



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Tahun 2019-2024



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

2021

Alamat : Jalan Sunan Drajat No. 15-Sumber

Telp : (0231) 8330580

Email : diskominfo@cirebonkab.go.id

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 517 - Diskominfo/2021

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika baik PNS PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
 - 4) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, data dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;

- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 517 -Diskominfo/2021

TANGGAL : 4 Oktober 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Cucu Perisa, S.Sos
 4. Achmad Tauhid, SE
 5. Hendra Permana, SE
 6. Sueni
- b. Bidang Teknologi Informatika
1. Kepala Bidang Teknologi Informatika
 2. Kepala Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem
 3. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika
 4. Aries Budiono, SE
 5. Ahmad Suhada, S.Kom
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 2. Kepala Seksi Informasi Publik
 3. Kepala Seksi Komunikasi Publik
 4. Kepala Seksi Kehumasan dan Kemitraan
 5. Deajeng Sendratalari, SH
- d. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government
1. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government
 2. Kepala Seksi Statistik
 3. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
 4. Kepala Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government
 5. M. Ginanjar

BUPATI CIREBON,



IMRON

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 050.3/Kep.517-Diskominfo/2021
Tanggal : 4 Oktober 2021
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibidang perencanaan diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas “merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang perandian”, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : ”Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



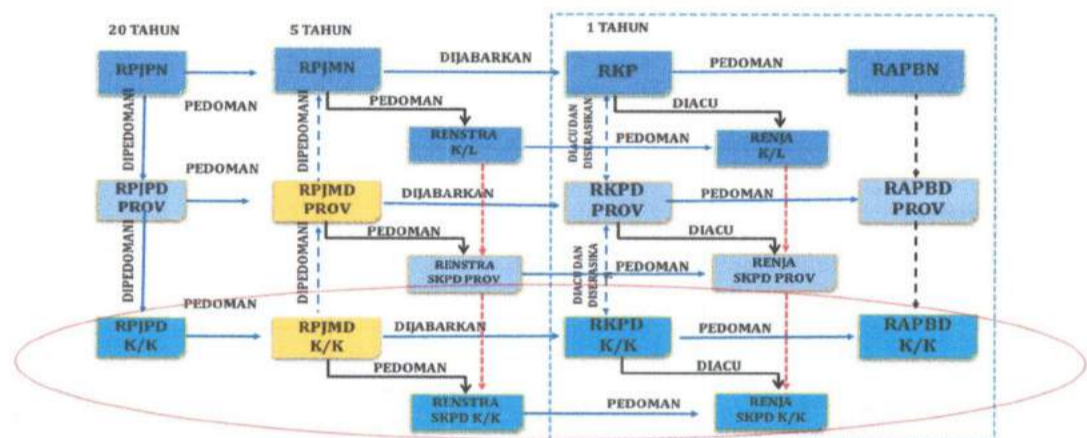
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika

pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



Gambar 1.2 Bagan keterkaitan RPJMD dan Renstra

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon perlu menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang ditetapkan tahun 2021 ini, maka dilakukan reviu internal dan selanjutnya dilakukan revisi/perubahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4), bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 berdasarkan hasil reviu internal yang dilakukan, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon; dan
4. Penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan serta penambahan subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang disusun setiap tahun. Selain itu Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
- n. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Operangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 2 Seri E.2);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
 - z. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
 - aa. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - bb. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Perubahan Renstra tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- b. Sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Perubahan Renstra tahun 2019-2024 adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi Kepala perangkat daerah dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika Penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

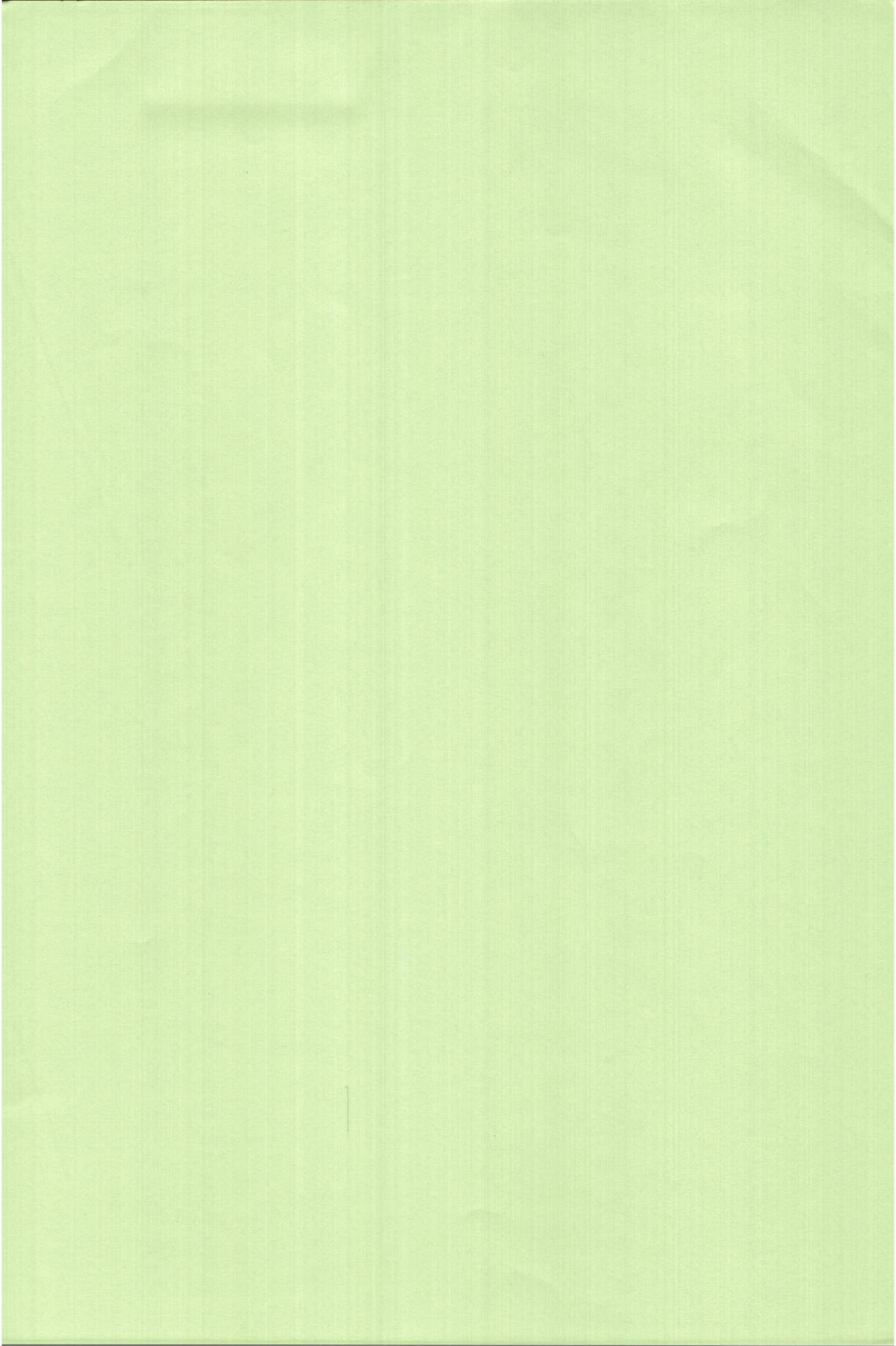
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan Untuk masa 5 tahun yang akan datang.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah:

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan kehumasan dan kemitraan;
4. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
5. Layanan Data Center, *Disaster Recovery Center* dan *Command Center*;
6. Layanan penggunaan domain dan sub domain pemerintah;
7. Layanan keamanan informasi;
8. Layanan data statistik sektoral;
9. Layanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon maka ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok “merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

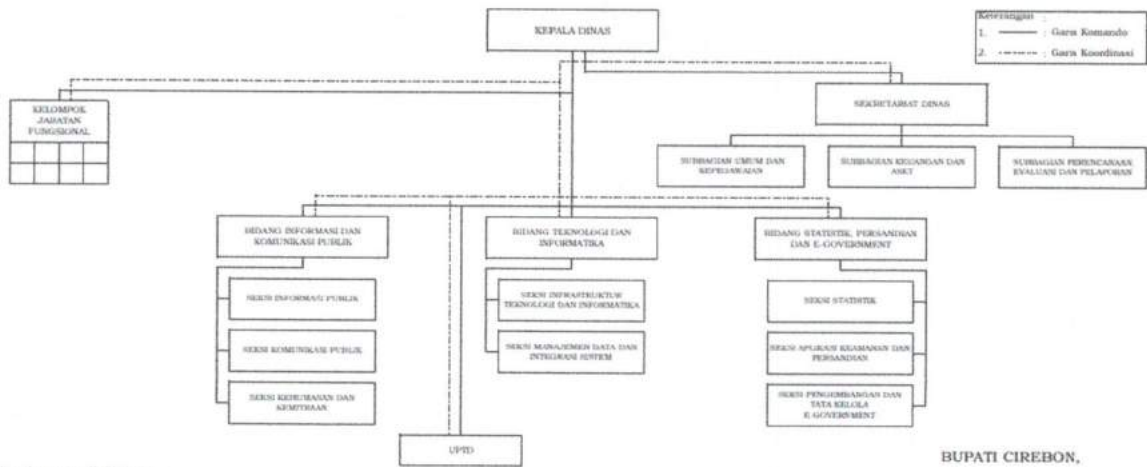
Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pengelolaan statistik sektoral;
- f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
CIREBON

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 20 Tahun 2021
Tanggal : 12 April 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pengelolaan aplikasi informatika;
- pengelolaan statistik sektoral;
- penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;

- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.

Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. penyusunan perjanjian kinerja dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

- f. pengoordinasian penerapan dan pengembangan serta pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi; h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;

- f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;
- h. pengevaluasian dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi Publik

Seksi Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Informasi Publik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis kegiatan Informasi Publik.

Seksi Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Informasi Publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. pelayanan informasi publik;
- d. penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
- e. perencanaan kegiatan Seksi Informasi Publik
- f. layanan permohonan informasi publik;
- g. pengumpulan pendapat umum;
- h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi dan Media Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Komunikasi Publik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis kegiatan Komunikasi Publik.

Seksi Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- b. pengelolaan media komunikasi publik;
- c. manajemen komunikasi krisis;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. penyampain informasi publik melalui media milik pemerintah;
- f. penyampain informasi publik melalui media intrapersonal;
- g. penyampain informasi publik melalui media luar ruang;
- h. penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten/kota.
- i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kehumasan dan Kemitraan

Seksi Kehumasan dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Kehumasan dan Kemitraan mempunyai (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kehumasan dan Kemitraan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis kegiatan Kehumasan dan Kemitraan.

Kepala Seksi Kehumasan dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Kehumasan dan Kemitraan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. layanan hubungan media;
- d. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- f. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- g. penyediaan Akses informasi;
- h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Kehumasan dan Kemitraan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknologi dan Informatika (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan bidang Teknologi dan Informatika.

Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Teknologi dan Informatika
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional kegiatan Bidang Teknologi dan Informatika;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

- d. pelaksanaan layanan infrastruktur dasar Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- f. pelaksanaan pelayanan manajemen data informasi dan integrasi layanan public dan pemerintahan di daerah;
- g. pelayanan pelaksanaan audit TIK bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- h. pelaksanaan perhitungan pelaporan/evaluasi indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- i. pengevaluasian dan pelaporan di bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika

Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis Infrastruktur Teknologi dan Informatika.

Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

- c. penyiapan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
- d. penyiapan bahan pelayanan *government cloud computing*;
- e. penyiapan bahan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- f. penyiapan bahan pelayanan filtering konten negatif (jaringan pemerintah daerah
- g. penyiapan bahan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem

Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis Manajemen Data dan Integrasi Sistem.

Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem;
- b. penyiapan bahan pelayanan penetapan standar format data dan informasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan walidata dan kebijakan
- d. penyiapan bahan pelayanan recovery data dan informasi;
- e. penyiapan bahan pelayanan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
- f. penyiapan bahan pelayanan interoperabilitas
- g. penyiapan bahan pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- h. penyiapan bahan pelayanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
- i. penyiapan bahan pelayanan monitoring trafik elektronik;
- j. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT

Bidang Statistik, Persandian dan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik, Persandian dan e-Government (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Statistik, Persandian dan e-Government mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan e-Government.

Bidang Statistik, Persandian dan e-Government mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan e-Government;
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan e-Government;
- c. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- d. penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi;
- f. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- g. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPD;
- h. perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi, Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandi;
- i. pelayanan pelaksanaan audit TIK;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Daerah;



- l. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- m. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Statistik, Persandian dan e-Government;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik, Persandian dan e-Government;
- o. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Statistik, Persandian dan e-Government;
- p. pengevaluasian dan pelaporan di bidang; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Statistik

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Statistik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Statistik mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Seksi Statistik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Seksi Statistik;
- b. pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
- c. peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- d. pembangunan Metadata Statistik Sektoral;
- e. peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- f. pengembangan Infrastruktur data Statistik;
- g. penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian

Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Aplikasi, Keamanan dan Persandian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis Aplikasi Keamanan dan Persandian.

Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
- b. penyiapan bahan pelayanan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- c. penyiapan bahan pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik
- d. penyiapan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pelayanan penetapan dan pengelolaan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. penyiapan bahan pelayanan Penetapan tata kelola nama domain, sub domain;
- g. penyiapan bahan pelayanan penanganan insiden keamanan informasi;
- h. penyiapan bahan pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- i. penyiapan bahan pelayanan pelaksanaan audit aplikasi keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah;
- j. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
- k. penyiapan bahan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi



- pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak;
- l. penyiapan bahan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - n. penyiapan bahan pelayanan Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
 - o. penyiapan bahan penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - p. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - q. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan penyiapan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
 - r. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah
 - s. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
 - t. penyiapan bahan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
 - u. penyiapan bahan pengamanan kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - v. penyiapan bahan pelaksanaan Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;



- w. penyiapan bahan pelayanan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- x. penyiapan bahan pelayanan penyusunan instrumen dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- z. penyiapan bahan perencanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Daerah
- aa. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi;
- bb. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian; dan
- cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government

Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan teknis Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government.

Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Tatakelola dan Evaluasi Layanan e-Government;



- b. pelayanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
- c. pelayanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- d. pelayanan Integrasi Pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah daerah;
- e. pelayanan implementasi e-government dan smart city;
- f. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan smart city;
- g. pelayanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi smart city;
- h. pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;
- i. pengembangan business process reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- j. pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- k. pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi dan keamanan informasi aparatur pemerintahan;
- l. pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- m. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber, telepon (0231) 8330580 kode pos 45611.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut

ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

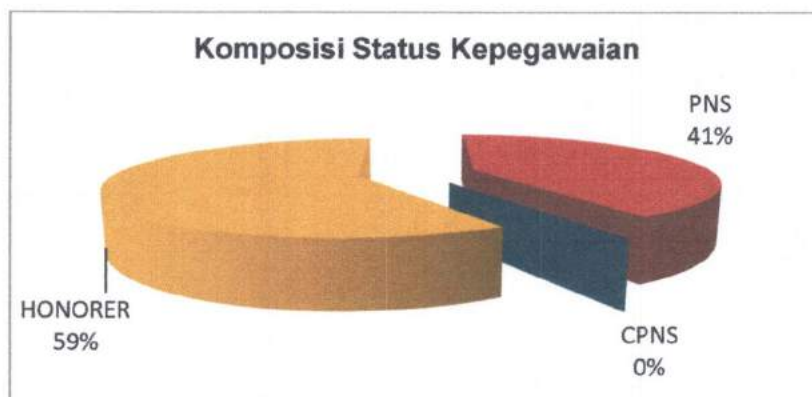
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

A. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	24	41%
2	CPNS	0	0%
3	Honorar	34	59%
		58	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2021

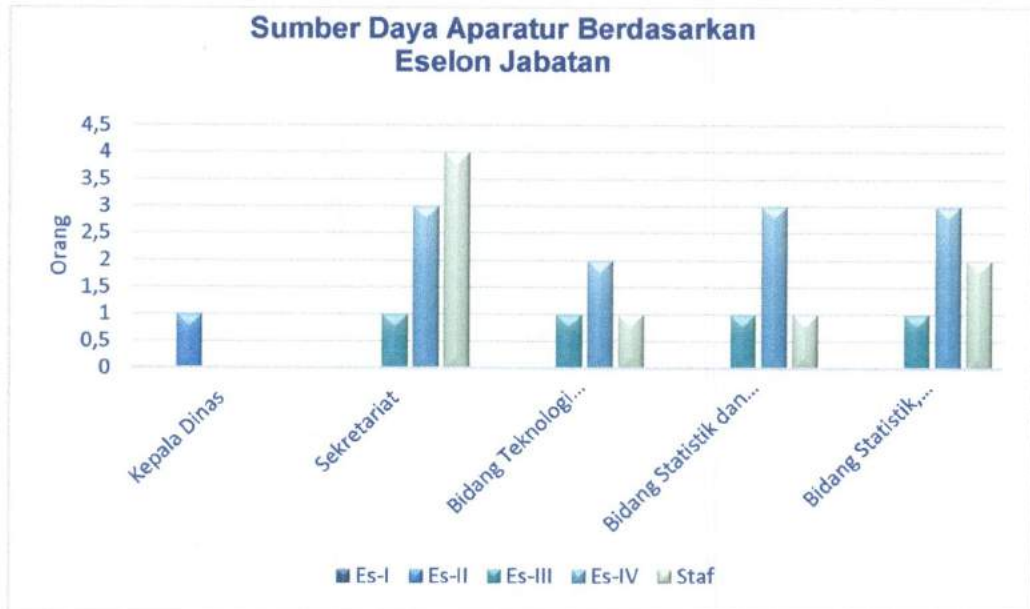


B. Komposisi Eselon PNS

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Es-I	Es-II	Es-III	Es-IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat			1	3	4	8
3	Bidang Teknologi Informasi			1	2	1	4
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			1	3	1	5
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government			1	3	2	6
	Jumlah		1	4	11	8	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2021



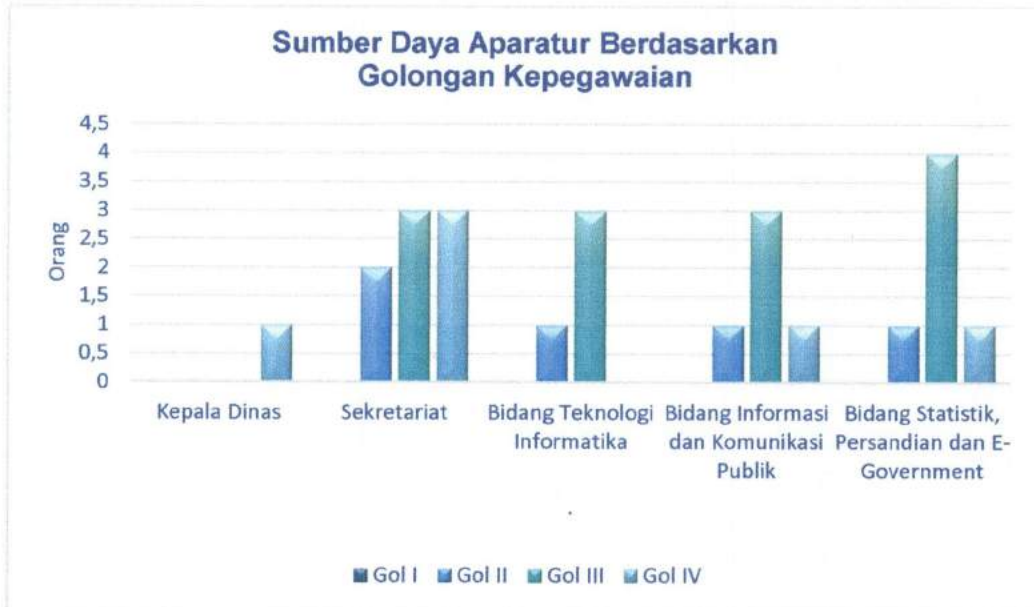
C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	3	3	2		8
3	Bidang Teknologi Informasi		3	1		4
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	3	1		5
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	1	4	1		6
Jumlah		6	13	5		24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2021



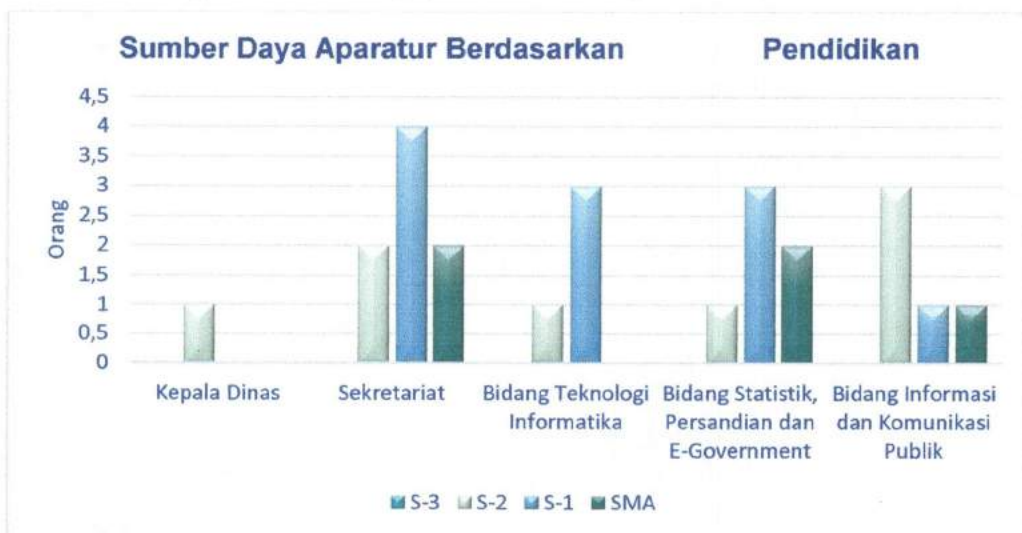
D. Komposisi Pendidikan PNS

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretariat		2	4	2	8
3	Bidang Teknologi Informasi		1	3		4
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		3	1	1	5
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government		1	3	2	6
	Jumlah		8	11	5	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2021

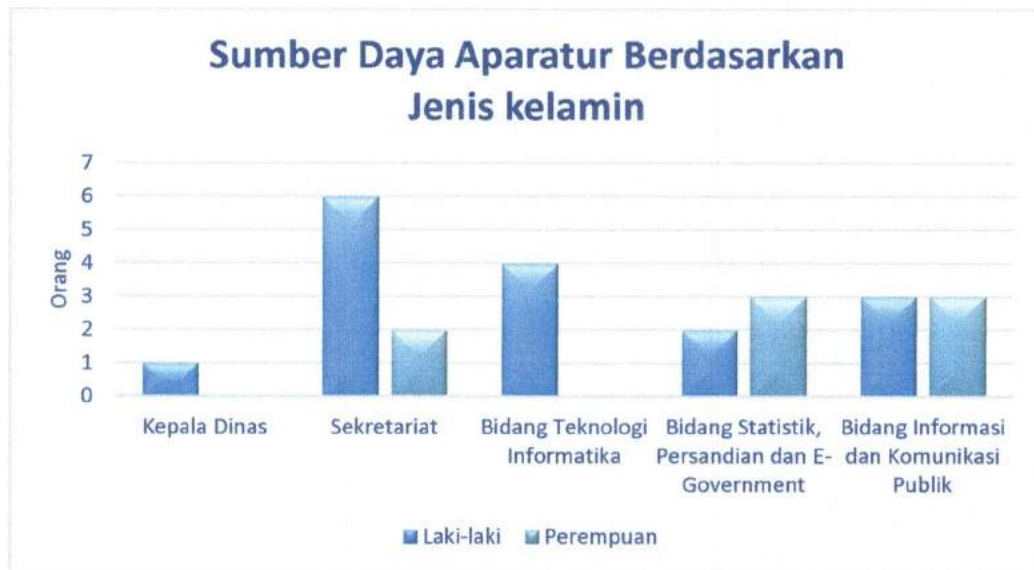


E. Komposisi Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	6	2
3	Bidang Teknologi Informasi	4	
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	3
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	3	3
	Jumlah	16	8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2021



F. Kebutuhan Ideal Pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdiri atas sekretariat dan 3 bidang yaitu bidang informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi informatika dan bidang statistik, persandian dan e-government. Interpretasi dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Sekretariat

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Sekretariat sebanyak 8 pegawai, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada sekretariat sebanyak 12 pegawai ASN.



No	Sekretariat	Exiting	Ideal
1	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
	Kasubbag Keuangan dan Aset	1	1
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1
	Pengadministrasian Umum	2	5
	Pengolah data perencanaan penganggaran	0	1
	Penyusun program anggaran dan Pelaporan	0	1
	Analisis sumber daya manusia	0	1
	Arsiparis	1	1
	Jumlah	6	12

➤ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 5 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 9 pegawai ASN.

No	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Exiting	Ideal
1	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1	1
2	Kasi informasi publik	1	1
3	Kasi kehumasan dan kemitraan	1	1
4	Kasi komunikasi publik	1	1
5	Analisis humas	0	1
6	Pengadministrasian analisis dan kemitraan media	0	1
7	Penyusun dokumen kesenian dan perfilman	0	1
8	Penata liputan	0	1
9	Pengadministrasian keuangan	1	1
	Jumlah	5	9

➤ Bidang Teknologi Informatika

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Teknologi Informatika sebanyak 4 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan

ideal pegawai yang ada pada Bidang Teknologi Informatika sebanyak 10 pegawai ASN.

No	Bidang Teknologi Informatika	Exiting	Ideal
1	Kabid Teknologi Informatika	1	1
2	Kasi Infrastruktur Teknologi	1	1
3	Kasi Manajemen dan Integrasi Sistem	1	1
4	Pranata teknologi informasi komputer	0	6
5	Pengadministrasian keuangan	1	1
Jumlah		4	10

➤ Bidang Statistik, Persandian dan E-Government

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 6 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 10 pegawai ASN.

No	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	Exiting	Ideal
1	Kabid Statistik, Persandian dan E-Government	1	1
2	Kasi statistik	1	1
3	Kasi aplikasi, persandian dan keamanan	1	1
4	Kasi tata kelola e-government	1	1
5	Analisis statistik	0	1
6	Pranata teknologi informasi komputer	0	2
7	Sandiman	0	1
8	Pengadministrasian keuangan	2	2
Jumlah		6	10

2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun



upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Data Aset Tanah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Jenis Barang	Letak/Alamat	Penggunaan
1	Tanah Gedung Kantor	Jl. Sunan Drajat No.15 Sumber	Diskominfo
2	Tanah Rumah Dinas	Jl. Kertasura No. 21 Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung	Gd eks. Rumah Dinas Deppen
3	Tanah Radio Ranggajati	Jl. Tuparev No. 69 Cirebon	Radio Ranggajati

Tabel 2.7 Daftar Sarana Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah Existing	Jumlah Ideal
1	AC	16	20
2	AC Cassette	0	2
3	Alat penghancur kertas	1	2
4	Audio mixer portable	2	2
5	Audio visual	2	2
6	Brankas	1	4
7	CCTV	24	42
8	Dispenser	2	5
9	Electric white board	1	1
10	Exhaust Fan	4	4
11	Filing Cabinet	8	11
12	Faksimili	1	1
13	GPS	3	3
14	Genset	1	2
15	Hardisk	4	10
16	Handycam	1	1
17	Kabel UTP	32	40
18	Kamera Film	2	2
19	Kamera digital	6	6
20	Kamera udara	1	2



No	Nama Barang	Jumlah Existing	Jumlah Ideal
21	Komputer/PC	40	60
22	Kompor gas	1	1
23	Kursi rapat	80	100
24	Kursi Kerja	80	100
25	Kursi tamu	5	6
26	Kursi putar	65	70
27	Layar Film/proyektor	5	5
28	Lemari arsip	2	10
29	Lemari sorok	3	3
30	Lemari kaca	2	4
31	Lemari besi	28	30
32	Lemari kayu	7	7
33	Lensa kamera	4	4
34	Laptop	9	12
35	Lemari es	1	3
36	Meja ½ biro	30	40
37	Meja komputer	25	30
38	Meja receptionis	3	3
39	Meja rapat	6	6
40	Meja kerja	15	18
41	Meja absensi	1	1
42	Mesin penghancur kertas	1	3
43	Microphone/Mic	20	40
44	Pesawat telepon	1	1
45	Podium	1	1
46	Power Supply	6	10
47	Printer	19	25
48	Radio	1	1
49	Rak kayu	1	1
50	Rak besi	16	16
51	Rak server	3	6
52	Roda 2	11	12
53	Roda 4	6	8
54	Scanner	7	10
55	Server	28	40
56	Sice	1	1
57	Sofa	5	5
58	Sound System	2	3
59	Tabung gas	2	2
60	Tablet PC	7	7
61	Tangga alumunium	1	1
62	Televisi	15	20
63	Transportable genering set	1	1
64	Vacum cleaner	1	1
65	Video mixer	1	1
66	Wireless aplifier	2	2

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, 2021



Tabel 2.8 Daftar Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik

No	Uraian
1	Papan pengumuman
2	Running Text
3	Website Dinas (diskominfo.cirebonkab.go.id)
4	Website Kabupaten (cirebonkab.go.id)
5	Lembar leaflet
6	Bookleat
7	Eksempler majalah (Paseban)
8	Desk layanan informasi publik
9	Mobil diseminasi informasi (wawar)
10	Ruang internet publik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana.



Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Tabel 2.8
Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Periode 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Rasio Capaian pada tahun n					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SPM Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo No.27/PER/M.KOMINFO/12/2010)																		
I	Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional:																		
	a. Media Massa																		
	- Majalah	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	100	100	100	100	100	100
	- Radio	-	-	6 kl	6 kl	18 kl	11 kl	-	-	6 kl	6 kl	6 kl	18 kl	-	-	100	100	100	100
	- Televisi	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl	12 kl	10 kl	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl	5 kl	12 kl	100	100	100	100	100	100
	b. Media baru																		
	- Website	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	100	100	100	100	100	100
	c. Media Tradisional (kali/tahun)																		
	- Pertunjukan rakyat	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl	12 kl	2 kl	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl	6 kl	12 kl	100	100	100	100	100	100
	d. Media interpersonal (kali/tahun)																		
	- Pembinaan/ pelatihan/ bimtek/ Sosialisasi,dll	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl	8 kl	2 kl	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl	5 kl	8 kl	100	100	100	100	100	100
	e. Media luar ruang																		
	- Selayang pandang	-	2 kl	-	1 kl	1 kl	1 kl	-	2 kl	-	1 kl	1 kl	1 kl	-	100	-	100	100	100
	- Wawar keliling	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	48 kl	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	100	100	100	100	100	100
	- Pemutaran Film	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl	-	12 kl	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl	12 kl	-	100	100	100	100	100	-
II	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan																		
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kec	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	40 kec		40 kec	40 kec	40 kec	40 kec	40 kec	40 kec	60	60	60	60	60	100
2	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)																		
I	Urusan Komunikasi dan informatika																		
	1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
	2. Cakupan layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
	4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
	5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
II	Urusan Statistik																		
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	100
	Buku "Kabupaten Cirebon dalam angka"			ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	100
	Buku "PDRB"	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	100
III	Urusan Persandian																		
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6%	-	-	-	-	-	100
3	IKU Diskominfo																		
	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	81% 84 titik	86% 90 titik	92% 96 titik	97% 101 titik	100% 104 titik	100% 104 titik	82% 86 titik	88% 92 titik	109,6% 114 titik	138,4% 144 titik	138,4% 144 titik	138,4% 144 titik	102	102	118	142	138	138
	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6 jenis	7 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	150	175	300	300	300	300
	Jumlah website instansi pemerintah daerah	28 web	40 web	52 web	64 web	73 web	73 web	25 web	31 web	31 web	532 web	532 web	532 web	89	78	60	831	729	729



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Rasio Capaian pada tahun n					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi	-	-	1 jenis	3 jenis	4 jenis		-	-	1 jenis	4 jenis								
Prosentase pengawasan menara telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	100	100
Jumlah dokumen statistik yang akurat dan transparan	-	-	ada	ada	ada		-	-	ada	ada	ada		100	100	100	100	100	100
Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat bidang TIK	400 org	155 org	448 org	275 org	665 org		400 org	155 org	448 org	275 org	665 org		100	100	100	100	100	100
Jumlah publikasi informasi pembangunan yang tersampaikan	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media		5 media	5 media	5 media	5 media	5 media		100	100	100	100	100	100
Indikator SDGS																		
a. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Global																		
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	n/a	155 orang	448 orang	275 orang	300 orang	45 orang	n/a	155 orang	448 orang	275 orang	300 orang	45 orang	-	100	100	100	100	100
b. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020																		
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
c. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.																		
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	n/a	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	n/a	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	-	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	100
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	n/a	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	n/a	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	-	100	100	100	100	100
Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
d. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.																		
Proporsi individu yang menggunakan internet.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua indikator kinerja telah mencapai target. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut :

1. SPM bidang Komunikasi dan Informatika meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar), yaitu:
 - a) Pelaksanaan Diseminasi Informasi (terdapat 5 indikator);
 - b) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (terdapat 1 indikator).

Jumlah semua indikator bidang Komunikasi dan Informatika adalah 6 (enam) Indikator. Hasil pengumpulan template SPM bidang Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa tahun 2015 - 2018 semua indikator ada datanya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah bidang Komunikasi dan Informatika dalam memberikan layanan minimal secara menyeluruh sudah baik. Indikator yang digunakan sesuai Permen Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Capaian beberapa indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika belum memenuhi target nasional.

2. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, IKK Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup 3 urusan, yaitu:
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika (5 indikator)
 - b) Urusan Statistik (3 indikator)
 - c) Urusan Persandian (1 indikator)

Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mempunyai data, sementara pada urusan statistik semua indikator telah memenuhi target. Pada urusan persandian belum mempunyai data pendukung.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang semuanya telah mencapai target yang ditentukan.

2.3.1.1 Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Berikut gambaran pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

1. Media Massa

Pelayanan dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (TV dan Radio).

a. Majalah Paseban

Pelayanan informasi berupa media cetak yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Majalah PASEBAN. Pada realisasinya, majalah tersebut terbit setiap 2 (dua) bulan sekali dalam setahun yang didistribusikan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

b. TV dan Radio

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan diseminasi informasi melalui TV dan radio lokal dengan mengundang narasumber dari SKPD di Kabupaten Cirebon.

c. Surat Kabar

Pelayanan informasi melalui surat kabar lokal dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon.

2. Media Baru (*online*)

Di era digitalisasi ini, setiap daerah harus memiliki website pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Cirebon maupun kegiatan



pembangunan. Alamat website Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah <http://www.cirebonkab.go.id/> dan alamat website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah <http://www.diskominfo.cirebonkab.go.id/>.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Cirebon memanfaatkan media sosial dalam upaya memperluas akses informasi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki beberapa akun media sosial yaitu

a. FB

Fans Page Facebook resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat dikunjungi pada <https://www.facebook.com/diskominfokabcirebon>.

b. Instagram

Akun instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan alamat <https://www.instagram.com/diskominfokabcirebon>.

c. Twitter

Akun twitter resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah [@cirebonkab](https://twitter.com/cirebonkab). Akun ini telah terverifikasi (*verified*).

3. Media Interpersonal

Pelayanan informasi ke aparatur, masyarakat atau pelajar melalui media interpersonal adalah berupa kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta kegiatan pelatihan bidang komunikasi dan informasi.

4. Media Tradisional

Di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa kelompok media tradisional yang di wadahi FK METRA yang dilibatkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.



5. Media Luar Ruang

Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang adalah berupa booklet, leaflet, banner dan spanduk. Media luar ruang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa informasi kegiatan pemerintah daerah, ucapan selamat maupun himbauan kepada masyarakat.

6. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

KIM merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial dengan memberdayakan Radio Komunitas yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

7. Penerapan Tata Kelola TIK

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city sudah berjalan dengan baik dimana didalamnya telah ada upaya dan pilot project integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Saat ini tercatat sebanyak 20 aplikasi dipergunakan di lingkungan instansi pemerintahan dimana jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah tersedia di seluruh Kabupaten Cirebon, baik berbasis kabel FO maupun yang bersifat wireless. Dari segi jangkauan (*coverage*) internet di Kabupaten Cirebon seluruh dinas sudah terhubung dengan jaringan FO sedangkan untuk kecamatan sebanyak 40 dan 12 kelurahan menggunakan wireless. Namun untuk Pemerintah Desa saat ini baru 9 desa yang difasilitasi wireless sedangkan 403 desa lainnya menggunakan internet mandiri yang diselenggarakan Telkom. Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menambah jumlah bandwidth sehingga seluruh desa dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Saat ini kapasitas bandwidth sebesar 800 Mbps.



Selain itu Data Center telah dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan kapasitas 24 server meskipun masih belum memenuhi standar kelayakan data center dan belum mampu menjadi data recovery center namun target minimal Tier 1 pada tahun 2024. Terkait pemberina akses internet kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakna 16 titik hotspot publik. Walaupun deminikan, kebutuhan tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi komunikasi/informatika. Pengamanan data yang dilakukan dengan memberlakukan password untuk akses data dan menggunakan firewall barracuda untuk server di data center. Operator data center melakukan backup data dan aplikasi secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Untuk aplikasdi internal atau sudomain, juga penggunaan subnet berbeda dengan akses publik dengan akses jaringan internal. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dan TIK, Kabupaten Cirebon masih perlu membangun rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan secara komprehensif.

Beberapa aplikasi yang fokus untuk kepentingan pemerintahan sudah dikembangkan oleh Badan/Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.9
Data Layanan Publik yang telah Dibangun

NO	LAYANAN PUBLIK	SISTEM INFORMASI	APLIKASI INFORMASI	KETERANGAN
1	Publik -Jaminan Sosial	SIM SLRT	Aplikasi pendaftaran Surat Rujukan Tidak Mampu	Dinas Sosial
2		SIM PMKS	Sistem Informasi Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
3	Publik - Kependudukan	SIM eKTP	Aplikasi pendaftaran ktp elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4		SIM Akta Online	Aplikasi pendaftaran akta online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5		SIM Sintren	Aplikasi pendaftaran kartu keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Publik - Kesehatan	SIM Rujukan	Aplikasi rujukan kegawatdaruratan kesehatan	Dinas Kesehatan
7		SIM rujukan kab. cirebon	Sistem informasi untuk kegawat daruratan kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Publik - Komunikasi dan Informasi	SIM PPID	Sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
9		SIM informasi Pemkab	Sistem Informasi Manajemen berbentuk video kegiatan Pemkab	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Publik - Pekerjaan dan Bisnis	SIM Produk Unggulan Desa	Sistem informasi menampilkan produk- produk unggulan desa	Bappelitbangda
11		SIM Harga Produk Pangan	Sistem untuk menginformasikan harga produk pangan	Dinas Ketahanan Pangan
12		SIM Izin Online	Aplikasi perizinan online Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13		SIM Tera	Aplikasi pendaftaran tera ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14		SIM Retribusi Pasar	Sistem informasi Pendataan Pendapatan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15		SIM Industri	Sim Informasi untuk data perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16		SIM Industri	Sim Informasi untuk data perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17		SIM Metrologi Legal	Sim informasi untuk pendaftaran tera ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18		Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
19		Sistem Informasi Tenaga Kerja	Sistem pencarian kerja di Kab. Cirebon	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20		SIM Permohonan Rekom PMI	Sistem Informasi pekerja migran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21		SIM Paten	Aplikasi perizinan di kecamatan	Kecamatan Suranenggala
22		SIM OpenSID	Aplikasi informasi dan pelayanan perizinan desa	Pemerintah Desa
23		Publik - Pendidikan	Sistem Informasi Dapodik	Website ini memberikan informasi Data Pokok Pendidikan di Provinsi meliputi Data Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Data Pokok Peserta Didik (NISN), dan Data Pokok . Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK)
24	SIM Laporan individu sekolah		Sistem informasi menampilkan individu siswa	Dinas Pendidikan
25	Publik - Pengajaran	SIM Perpustakaan	Aplikasi perpustakaan digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Publik - Keuangan	SIM RPAS	Aplikasi retribusi pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	LAYANAN PUBLIK	SISTEM INFORMASI	APLIKASI INFORMASI	KETERANGAN
27	Publik - Lainnya	SIM Dashboard Kepegawaian	Dashboard Kepegawaian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
28		SIM Dinas	Website Dinas	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
29		SIM Informasi Keormasan	Sistem Informasi Manajemen untuk data ormas	Badan Kesbangpol
30		Sistem Informasi Dinas Keuangan dan Aset	Website Dinas	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31		SIM Dashboard Keuangan	Dashboard Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
32		SIM Pemkab	Sistem website Pemkab	Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
33		SIM Dinas	Website Dinas	BPBD
34		Sistem Informasi Dinas Arsip Pus	Website Dinas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
35		SIM Dinas Parbudpora	Website Dinas	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
36		SIM Dinas Kesehatan	Website Dinas	Dinas Kesehatan
37		Sistem Informasi Komuditas Pangan	Sistem Informasi average harga bahan pokok	Dinas Ketahanan Pangan
38		SIM Pemkab	Website Informasi Pemerintah Kab. Cirebon	Dinas Komunikasi dan Informatika
39		SIM Direktori	Website Keberadaan Lokasi Usaha	Dinas Komunikasi dan Informatika
40		SIM Dinas Kominfo	Website Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
41		SIM Informasi Koperasi	Sim informasi untuk data Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
42		SIM Dinas	Website Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
43		SIM Dinas	Website Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
44		SIM Dinas PMPTSP	Website Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
45		SIM Dinas Pendidikan	Website Dinas	Dinas Pendidikan
46		SIM Dinas	Website informasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
47	SIM Inspektorat	Website Dinas	Inspektorat	
48	SIM PKK	Website Organisasi PKK	PKK Kab. Cirebon	

Sumber : LPPD Tahun 2020



Dari berbagai aplikasi yang sudah dibuat merupakan sebagai salah satu penunjang *smart city* dan rencananya aplikasi tersebut akan dikembangkan lagi fiturnya serta dibuat aplikasi baru baik untuk pemerintahan dan pelayanan publik sehingga capaian *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik.

8. Situs Subdomain Kabupaten Cirebon

Berikut situs yang terintegrasi subdomain Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Data Situs Subdomain Kabupaten Cirebon

No	Nama Situs	Alamat	Status
	PELAYANAN		
1	Sistem informasi kepegawaian pemerintah	simpeg.cirebonkab.go.id	Active
2	Sistem informasi terpadu kependudukan	disdukcapil.cirebonkab.go.id/sintren	Active
3	Sistem informasi metadata	metadata.diskominfo.cirebonkab.go.id	Active
4	Sistem informasi COVID19	covid19.cirebonkab.go.id	Active
5	Sistem Informasi Kabupaten Cirebon	cirebonkab.go.id	Active
6	Sistem pelayanan vaksinasi	vaksinasi.cirebonkab.go.id	Active
7	Sistem pelayanan SLRT/SiPEPEK	simpepeg.cirebonkab.go.id	Active
8	Repositori Gitlab Kabupaten Cirebon	gitlab.cirebonkab.go.id	Active
9	Sistem informasi Smart City Kabupaten Cirebon	smartcity.cirebonkab.go.id	Active
10	Sistem absensi pelantikan pejabat Kabupaten Cirebon	pelantikan.cirebonkab.go.id	Active
11	Sistem pelayanan penapisan pemudik	balikjeh.cirebonkab.go.id	Active
12	Sistem presensi kepegawaian	presensi.cirebonkab.go.id	Active
13	Badan pendapatan daerah kabupaten Cirebon	simpad.cirebonkab.go.id	Active
14	Sistem perencanaan informasi permbangunan daerah	perencanaan.cirebonkab.go.id	Active
	PERANGKAT DAERAH		
1	Dinas Pendidikan	disdik.cirebonkab.go.id	Active
2	Inspektorat	inspektorat.cirebonkab.go.id	Active
3	Dinas Kesehatan	labkesda.cirebonkab.go.id	Non-Active
4	Dinas Kesehatan	dinkes.cirebonkab.go.id	Active
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	bpsk.cirebonkab.go.id	Active
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.cirebonkab.go.id	Active
7	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	disbudparpora.cirebonkab.go.id	Active



No	Nama Situs	Alamat	Status
8	Dinas Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.cirebonkab.go.id	Non-Active
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	incucaruban.cirebonkab.go.id	Non-Active
10	PKK	pkk.cirebonkab.go.id	Non-Active
11	Setda	setda.cirebonkab.go.id	Active
12	Dinas Ketahanan Pangan	harga.dishanpang.cirebonkab.go.id	Active
13	Dinas Lingkungan Hidup	blhd.cirebonkab.go.id	Non-Active
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.cirebonkab.go.id	Active
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	perpustakaan.cirebonkab.go.id	Active
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	infonaker.cirebonkab.go.id	Non-Active
17	TV Kabupaten Cirebon	tv.cirebonkab.go.id	Non-Active
18	Litbang Bappelitbangda	litbang.bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Active
19	Simiskinrangga Bappelitbangda	simiskinrangga.bappelitbangda.cirebonkab.go.id	Active
20	Foodiary Dinkes	foodiary.dinkes.cirebonkab.go.id	Active
21	Arsip	arsip.cirebonkab.go.id	Active
	KECAMATAN		
1	Kec. Suranenggala	suranenggalakec.cirebonkab.go.id	Active
	DESA		
1	Desa Kec. Gegesik	jagapurakidul.desa.cirebonkab.go.id	Active
2	Desa Kec. Gegesik	gegesikkulon.desa.cirebonkab.go.id	Active
3	Desa Kec. Gempol	palimananbarat.desa.cirebonkab.go.id	Active
4	Desa Kec. Gempol	cikeusal.desa.cirebonkab.go.id	Active
5	Desa Kec. Gempol	cupang.desa.cirebonkab.go.id	Active
6	Desa Kec. Gempol	gempol.desa.cirebonkab.go.id	Active
7	Desa Kec. Gempol	kempek.desa.cirebonkab.go.id	Active
8	Desa Kec. Gempol	walahar.desa.cirebonkab.go.id	Active
9	Desa Kec. Gempol	kedungbunder.desa.cirebonkab.go.id	Active
10	Desa Kec. Gempol	winong.desa.cirebonkab.go.id	Active
11	Desa Kec. Gunung Jati	pasindangan.desa.cirebonkab.go.id	Active
12	Desa Kec. Greged	lebakmekar.desa.cirebonkab.go.id	Active
13	Desa Kec. Greged	sindangkempeng.desa.cirebonkab.go.id	Active
14	Desa Kec. Jamblang	bakungkidul.desa.cirebonkab.go.id	Active
15	Desa Kec. Klangeran	danawinangun.desa.cirebonkab.go.id	Active
16	Desa Kec. Lemahabang	cipeujeuhkulon.desa.cirebonkab.go.id	Active
17	Desa Kec. Losari	ambulu.desa.cirebonkab.go.id	Active
18	Desa Kec. Plered	cangkring.desa.cirebonkab.go.id	Active
19	Desa Kec. Plered	gamel.desa.cirebonkab.go.id	Active



No	Nama Situs	Alamat	Status
20	Desa Kec. Plered	kaliwulu.desa.cirebonkab.go.id	Active
21	Desa Kec. Plered	panembahan.desa.cirebonkab.go.id	Active
22	Desa Kec. Plered	pangkalan.desa.cirebonkab.go.id	Active
23	Desa Kec. Plered	sarabau.desa.cirebonkab.go.id	Active
24	Desa Kec. Plered	tegalsari.desa.cirebonkab.go.id	Active
25	Desa Kec. Plered	trusmikulon.desa.cirebonkab.go.id	Active
26	Desa Kec. Plered	trusmiwetan.desa.cirebonkab.go.id	Active
27	Desa Kec. Plered	wotgali.desa.cirebonkab.go.id	Active
28	Desa Kec. Plumbon	cempakplumbon.desa.cirebonkab.go.id	Active
29	Desa Kec. Plumbon	pamijahan.desa.cirebonkab.go.id	Active
30	Desa Kec. Plumbon	lurah.desa.cirebonkab.go.id	Active
31	Desa Kec. Plumbon	marikangen.desa.cirebonkab.go.id	Active
32	Desa Kec. Plumbon	bodelor.desa.cirebonkab.go.id	Active
33	Desa Kec. Plumbon	bodesari.desa.cirebonkab.go.id	Active
34	Desa Kec. Plumbon	gombang.desa.cirebonkab.go.id	Active
35	Desa Kec. Plumbon	karangmulya.desa.cirebonkab.go.id	Active
36	Desa Kec. Plumbon	karangsemplumbon.desa.cirebonkab.go.id	Active
37	Desa Kec. Plumbon	plumbon.desa.cirebonkab.go.id	Active
38	Desa Kec. Plumbon	purbawinangun.desa.cirebonkab.go.id	Active
39	Desa Kec. Plumbon	kebarepan.desa.cirebonkab.go.id	Active
40	Desa Kec. Plumbon	pesangrahan.desa.cirebonkab.go.id	Active
41	Desa Kec. Plumbon	kedungsana.desa.cirebonkab.go.id	Active
42	Desa Kec. Plumbon	danamulya.desa.cirebonkab.go.id	Active
43	Desa Kec. Sumber	matangaji.desa.cirebonkab.go.id	Active
44	Desa Kec. Sumber	sidawangi.desa.cirebonkab.go.id	Active
45	Desa Kec. Suranenggala	muara.desa.cirebonkab.go.id	Active
46	Desa Kec. Suranenggala	purwawinangun.desa.cirebonkab.go.id	Active
47	Desa Kec. Suranenggala	surakarta.desa.cirebonkab.go.id	Active
48	Desa Kec. Suranenggala	keraton.desa.cirebonkab.go.id	Active
49	Desa Kec. Suranenggala	suranenggala.desa.cirebonkab.go.id	Active
50	Desa Kec. Suranenggala	suranenggalakidul.desa.cirebonkab.go.id	Active
51	Desa Kec. Suranenggala	suranenggalalor.desa.cirebonkab.go.id	Active
52	Desa Kec. Suranenggala	suranenggalakulon.desa.cirebonkab.go.id	Active
53	Desa Kec. Suranenggala	karangreja.desa.cirebonkab.go.id	Active
54	Desa Kec. Susukan Lebak	wilulang.desa.cirebonkab.go.id	Active
55	Kelurahan Kec. Sumber	sumber.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
56	Kelurahan Kec. Sumber	kaliwadas.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active



No	Nama Situs	Alamat	Status
57	Kelurahan Kec. Sumber	pasalakan.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
58	Kelurahan Kec. Sumber	pejambon.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
59	Kelurahan Kec. Sumber	sendang.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
60	Kelurahan Kec. Sumber	gegunung.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
61	Kelurahan Kec. Sumber	tukmudal.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
62	Kelurahan Kec. Sumber	perbutulan.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
63	Kelurahan Kec. Sumber	babakansumber.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
63	Kelurahan Kec. Sumber	kemantren.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
65	Kelurahan Kec. Sumber	kenanga.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
66	Kelurahan Kec. Su,ber	watubelah.kelurahan.cirebonkab.go.id	Active
67	Desa Kecamatan Depok	kejuden.desa.cirebonkab.go.id	Active
68	Desa Kecamatan Karangsembung	sarasa.karangsembung.cirebonkab.go.id	Active

Sumber : Diskominfo, 2021

9. Surat Menyurat Elektronik (*E-Office*)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

10. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar perangkat daerah untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik.

11. Hotspot Area Publik

Untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan akses WiFi gratis (*free hotspot*) pada beberapa ruang terbuka publik di beberapa titik strategis wilayah Kabupaten Cirebon. Titik pelayanan akses internet gratis bagi masyarakat dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 2.11 Data Sebaran Hotspot Area Publik

No	Lokasi	No	Lokasi
1	Taman PKK Sumber	9	Kec Suranenggala
2	Kec Palimanan	10	Kec Gunungjati
3	Kec Arjawinangun	11	Kec Plumbon
4	Kec Lemahabang	12	Kec Weru
5	Kec Ciledug	13	Kec Karangsembung
6	Kec Gebang	14	Kec Susukan Lebak
7	Kec Klangeran	15	Kec Babakan
8	Kec Panguragan	16	RSUD Waled

12. *Help Desk* PPID dan Sengketa Informasi

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon untuk melakukan mediasi

13. Fasilitasi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa



informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

14. Learning Center

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah membangun *Learning Center* yang bertempat di gedung Data Center sebagai sarana ruangan Bimtek IT. Namun sarana dan prasarana penunjang Learning Center perlu ditingkatkan lagi seperti penambahan perangkat komputer dan ruangan yang lebih representatif lagi dan akan diusulkan pengembangannya ditahun mendatang.

15. Retribusi Menara Telekomunikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016, pelaksanaannya terkendala dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang menganulir penjelasan Pasal 124 Undang- undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga selama tahun 2016 tidak ada penarikan retribusi menara. Selanjutnya untuk tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan kebijakan penarikan retribusi menara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon. Dengan dasar ketentuan tersebut diatas, proses penarikan retribusi menara dapat dilaksanakan kembali.

Tabel 2.12 Data Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2014	1.757.729.934	1.623.232.284	92,34
2	2015	2.003.047.972	-	0
3	2016	-	-	-
4	2017	-	-	-
5	2018	1.800.000.000	2.136.552.000	118,70
6	2019	1.500.000.000	1.749.111.750	116,61
7	2020	1.800.000.000	2.401.254.375	133,40



16. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Salah satu layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan telekomunikasi. Keberadaan sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan pendidikan. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan data/internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil segera dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus mempercepat pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah. Dilihat dari luas wilayah, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon mencapai 100 %. Di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2018 baru terdapat 417 buah menara telekomunikasi yang tersebar di 40 kecamatan. Tabel data sebaran MT di Kabupaten Cirebon.

Di Kabupaten Cirebon terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan/penyewaan menara telekomunikasi (tower provider). Menara tersebut umumnya diperuntukkan penempatan BTS milik perusahaan itu sendiri maupun disewakan kepada operator telekomunikasi (telco operator) lain. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II.9

Tabel 2.13
Data provider yang beroperasi di Kabupaten Cirebon

No	Provider
1	PT. Telkomsel
2	PT. Tower Bersama
3	PT. Solusi Tunas Pratama
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi
5	PT. XL Axiata, Tbk
6	PT. Inti Bangun Sejahtera
7	PT. Indosat
8	PT. Centratama Menara Indonesia
9	PT. Hutchison CP Telecommunications
10	PT. Smartfren Telecom
11	PT. Kharisma Persada Mandiri



2.3.1.2. Kinerja Pelayanan Statistik

Pelaksanaan urusan Statistik mulai dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 yang sebelumnya dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan urusan statistik yang dimaksud merupakan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data statistik yang bersifat sektoral. Urusan Statistik tersebut bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.

2.3.1.3. Kinerja Pelayanan Persandian

Sebelum terbitnya Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, urusan persandian dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksananya masih terbatas pada pengelolaan berita yang masuk dan keluar yang bersifat rahasia atau terbatas.

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2014-2019 sebagai berikut:



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

Tabel 2.14
Target dan realisasi Anggaran
Periode 2014-2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.548.859.837	1.934.519.018	2.137.219.000	3.769.322.500	4.549.329.700	808.628.900	1.506.454.104	1.856.502.045	2.050.825.683	3.474.942.564	4.416.238.297	801.272.649	97,26	95,96	95,96	92,19	97,07	99,09		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.166.115.592	1.283.516.268	1.486.800.000	2.154.900.000	2.154.900.000	292.700.000	1.129.491.196	1.213.249.745	1.411.738.815	2.005.990.316	2.047.430.399	291.132.341	96,86	94,53	94,95	93,09	95,01	99,46		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	8.700.000	9.570.000	9.990.000	10.320.000	11.515.000	11.865.000	5.246.700	5.586.600	7.397.300	6.477.400	7.208.200	6.876.900	60,31	58,38	74,05	62,77	62,6	57,96		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	36.000.000	180.000.000	-	-	-	-	30.466.000	180.000.000	-	-	-	-	84,63	100		
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.050.000	15.455.000	15.000.000	20.678.000	24.000.000	4.900.000	14.050.000	15.449.000	13.750.000	20.667.948	24.000.000	4.900.000	100	99,96	91,67	99,95	100	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	28.207.808	43.382.500	43.000.000	52.492.000	53.230.000	39.970.000	28.207.808	43.382.500	42.914.200	52.203.000	53.230.000	39.970.000	100	100	99,8	99,45	100	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.589.000	14.443.000	13.500.000	16.890.900	19.608.200	7.982.400	14.589.000	13.993.000	13.050.000	16.490.900	16.408.200	7.982.400	100	96,88	96,67	97,63	83,68	100		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	3.550.000	3.888.000	3.465.000	4.005.000	4.200.000	3.000.000	3.550.000	3.888.000	3.465.000	4.005.000	4.200.000	3.000.000	100	100	100	100	100	100		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.387.292	407.235.300	453.539.000	1.297.348.600	1.918.375.900	12.414.000	156.553.000	405.020.000	451.676.200	1.164.460.000	1.916.096.360	12.414.000	100	99,46	99,59	89,76	99,88	100		
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.613.200	6.174.520	6.500.000	52.800.000	8.099.600	3.600.000	5.350.000	5.550.000	5.600.000	50.760.000	6.039.400	2.900.000	95,31	89,89	86,15	96,14	74,56	80,56		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.024.000	23.773.200	23.760.000	24.750.000	24.816.000	24.816.000	24.024.000	23.773.200	23.347.500	23.581.500	24.816.000	24.816.000	100	100	98,26	95,28	100	100		



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
11	Penyediaan makanan dan minuman	17.940.000	20.320.000	12.430.000	14.358.000	11.880.000	920.000	17.940.000	19.925.000	8.455.000	9.645.000	9.660.000	920.000	100	98,06	68,02	67,18	81,31	100,00		
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.682.945	106.761.230	69.235.000	120.780.000	246.705.000	46.461.500	107.452.400	106.685.000	69.231.668	120.660.500	246.673.738	46.461.500	99,79	99,93	100	99,9	99,99	100,00		
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	-	-	-	-	36.000.000	180.000.000	-	-	-	-	30.010.000	179.900.000	-	-	-	-	83,36	99,94		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.949.660.488	211.860.780	726.762.200	970.100.600	906.892.000	148.040.000	1.852.873.331	210.633.598	697.761.000	937.077.400	845.497.544	147.677.517	95,04	99,42	96,01	96,6	93,23	99,76		
1	Pembangunan gedung kantor	1.814.555.000	63.703.960	-	-	-	-	1.719.594.331	63.703.960	-	-	-	-	94,77	100	-	-	-	-		
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	21.900.000	-	250.000.000	-	-	-	19.725.000	-	240.159.700	-	-	-	90,07	-	96,06			
3	Pengadaan mebeleur	28.064.600	30.871.060	56.205.200	21.200.000	245.700.000	7.000.000	27.214.000	30.820.000	54.350.000	21.200.000	242.547.200	7.000.000	96,97	99,83	96,7	100	98,72	100,00		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.740.888	41.055.730	79.357.000	223.887.400	81.504.000	62.140.000	36.765.000	39.879.638	77.341.000	215.130.400	70.318.644	61.777.517	97,41	97,14	97,46	96,09	86,28	99,42		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.300.000	76.230.000	69.300.000	89.013.200	80.388.000	78.900.000	69.300.000	76.230.000	68.145.000	89.009.000	80.388.000	78.900.000	100	100	98,33	100	100	100,00		
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	500.000.000	636.000.000	249.300.000	-	-	-	478.200.000	611.738.000	212.084.000	-	-	-	95,64	96,19	85,07			
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.900.000	5.250.000	-	18.120.000	24.780.000	-	9.900.000	4.252.500	-	17.220.000	24.780.000	-	100	81	-	95,03	100			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	-	18.120.000	249.300.000	-	-	-	-	17.220.000	-	-	-	-	-	95,03	-			
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	9.900.000	5.250.000	-	-	24.780.000	-	9.900.000	4.252.500	-	-	24.780.000	-	100	81	-	-	100			



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.589.400	36.589.400	38.581.800	41.037.800	85.987.000	84.674.700	35.077.400	36.589.400	38.581.800	41.037.800	82.672.000	82.264.950	95,87	100	100	100	96,14	97,15		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.500.000	17.500.000	17.942.000	17.942.000	30.790.000	42.802.800	17.344.000	17.500.000	17.942.000	17.942.000	30.790.000	42.802.050	99,11	100	100	100	100	100,00		
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.999.600	8.999.600	9.770.000	10.888.800	42.417.000	31.181.900	7.643.600	8.999.600	9.770.000	10.888.800	39.102.000	31.172.900	84,93	100	100	100	92,18	99,97		
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.089.800	10.089.800	10.869.800	12.207.000	12.780.000	10.690.000	10.089.800	10.089.800	10.869.800	12.207.000	12.780.000	8.290.000	100	100	100	100	100	77,55		
V	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	11.821.200	27.818.500	19.784.000	20.000.000	73.704.000	42.853.800	10.271.200	12.987.000	19.784.000	20.000.000	73.304.000	42.853.800	86,89	46,68	100	100	99,46	100,00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	11.821.200	27.818.500	19.784.000	20.000.000	73.704.000	42.853.800	10.271.200	12.987.000	19.784.000	20.000.000	73.304.000	42.853.550	86,89	46,68	100	100	99,46	100,00		
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.421.184.488	1.469.541.000	2.550.164.400	2.543.733.400	7.547.950.000	-	3.356.460.200	1.460.504.200	2.487.386.400	2.485.892.000	6.770.933.490	-	98,11	99,38	97,54	97,73	89,71	-		
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	3.124.417.180	1.106.450.000	2.337.324.400	1.580.000.000	5.408.750.000	-	3.061.995.600	1.099.333.200	2.286.178.400	1.553.792.000	4.691.482.400	-	98	99,36	97,81	98,34	86,74	-		
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	193.167.308	197.873.600	139.190.000	400.893.400	302.870.000	-	191.006.600	197.333.600	127.763.000	386.512.400	289.397.194	-	98,88	99,73	91,79	96,41	95,55	-		
3	Pengadaan alat studio dan komunikasi	103.600.000	-	-	-	-	-	103.458.000	-	-	-	-	-	99,86	-	-	-	-	-		
4	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	-	-	-	172.000.000	1.060.650.000	-	-	-	-	157.802.000	1.032.561.000	-	-	-	-	91,75	97,35	-		



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.	-	63.091.000	73.650.000	235.000.000	-	-	62.791.000	73.445.000	233.940.000	-	-	-	99,52	99,72	99,55	-	-	-	-	-
6	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Pos Desa dan Jasa Titipan	-	102.126.400	-	-	-	-	88.146.400	-	-	-	-	-	86,31	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelayanan Akses Intranet dan Internet	-	-	-	155.840.000	374.117.600	-	-	-	153.846.000	364.155.496	-	-	-	-	98,72	97,34	-	-	-	-
8	Pengadaan Jaringan Untuk Area Publik	-	-	-	-	249.500.000	-	-	-	-	248.775.000	-	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-
9	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City/Regency	-	-	-	-	152.062.400	-	-	-	144.562.400	-	-	-	-	-	-	95,07	-	-	-	-
VII	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	67.634.000	99.500.000	53.995.000	85.000.000	103.637.400	-	67.447.000	98.805.000	53.820.000	84.680.000	-	99,72	99,3	99,68	99,62	-	-	-	-	-
1	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	67.634.000	99.500.000	53.995.000	85.000.000	-	67.447.000	98.805.000	53.820.000	84.680.000	-	-	99,72	99,30	99,68	99,62	-	-	-	-	-
2	Perumusan Regulasi kebijakan dan Monev penyelenggaraan e-Government	-	-	-	-	103.637.400	-	-	-	-	103.637.400	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
VIII	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	17.572.000	49.629.500	107.221.600	131.488.000	210.734.000	-	17.572.000	49.079.500	107.221.600	131.488.000	210.634.000	-	100	98,89	100	100	-	-	-	-
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	17.572.000	49.629.500	107.221.600	-	-	-	17.572.000	49.079.500	107.221.600	-	-	-	100	98,89	100	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Jurnalistik bagi Siswa SLTP/SLTA	-	-	-	28.988.000	88.164.000	-	-	-	-	28.988.000	88.064.000	-	-	-	-	100	99,89	-	-	-



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
3	Penyuluhan Internet Sehat, Kreatif Inovatif dan Produktif	-	-	-	102.500.000	122.570.000	-	-	-	-	-	102.500.000	122.570.000	-	-	-	-	100	100	-		
IX	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.851.424.352	1.899.899.400	1.891.620.800	854.955.200	1.592.902.200	-	1.832.316.380	1.807.386.320	1.764.246.400	839.068.200	1.574.723.509	-	98,97	95,13	93,27	98,14	98,86	-			
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.252.519.480	1.511.625.000	1.623.596.200	252.900.000	510.000.000	-	1.243.086.980	1.424.738.920	1.498.602.200	252.400.000	502.278.709	-	99,25	94,25	92,3	99,8	98,49	-			
2	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	598.904.872	388.274.400	268.024.600	288.349.000	597.822.200	-	589.229.400	382.647.400	255.644.200	282.259.000	593.494.100	-	98,38	98,55	99,11	97,89	99,28	-			
3	Kerjasama dengan Media Cetak	-	-	-	232.640.000	251.280.000	-	-	-	-	228.560.000	250.336.950	-	-	-	-	98,25	99,62	-			
4	penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik	-	-	-	81.066.200	233.800.000	-	-	-	-	75.849.200	228.613.750	-	-	-	-	93,56	97,78	-			
X	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik/ Statistik Daerah	-	-	239.885.100	834.483.500	1.413.488.900	-	-	-	239.885.100	833.561.500	1.408.764.744	-	-	-	100	99,19	99,67	-			
1	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	-	-	-	113.610.000	90.248.000	-	-	-	-	112.688.000	90.248.000	-	-	-	-	99,19	100	-			
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	-	-	239.885.100	320.873.500	344.751.900	-	-	-	239.885.100	320.873.500	342.251.900	-	-	-	100	100	99,27	-			
3	Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei ekonomi Daerah	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-			
4	Pengolahan Data sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	197.775.844	-	-	-	-	-	98,89	-			
5	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	-	-	-	-	778.489.000	-	-	-	-	-	778.489.000	-	-	-	-	-	100	-			



**Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Angga- ran	Realis- asi
XI	Program Persediaan untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	-	232.130.000	-	-	-	-	-	-	230.670.024	-	-	-	-	99,37	-		
1	Penyelenggaraan Persediaan dan Pengamanan Informasi	-	-	-	-	232.130.000	-	-	-	-	-	-	230.670.024	-	-	-	-	99,37	-		
XII	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	1.558.680.500	-	-	-	-	-	1.515.644.485	-	-	-	-	-	97,24		
	Produksi Konten Informasi Publik	-	-	-	-	-	172.893.000	-	-	-	-	-	170.232.160	-	-	-	-	-	98,46		
	penyediaan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik	-	-	-	-	-	404.249.200	-	-	-	-	-	404.007.530	-	-	-	-	-	99,94		
	Peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	-	-	-	-	-	230.000.000	-	-	-	-	-	228.100.000	-	-	-	-	-	99,17		
	Penyebarluasan informasi publik melalui media	-	-	-	-	-	280.856.400	-	-	-	-	-	276.499.400	-	-	-	-	-	98,45		
	Pengelolaan media komunikasi milik pemerintah	-	-	-	-	-	100.734.000	-	-	-	-	-	97.134.000	-	-	-	-	-	96,43		
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	-	-	-	-	-	151.447.900	-	-	-	-	-	124.206.230	-	-	-	-	-	82,01		
	Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian sengketa informasi publik	-	-	-	-	-	218.500.000	-	-	-	-	-	215.465.165	-	-	-	-	-	98,61		
XIII	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	-	-	-	-	7.088.512.200	-	-	-	-	-	6.942.863.771	-	-	-	-	-	97,95		
	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	49.080.000	-	-	-	-	-	98,16		
	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	-	-	-	-	-	197.000.000	-	-	-	-	-	193.695.000	-	-	-	-	-	98,32		



Perubahan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No	Program/Regiatan	Anggaran pada Tahun						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n						Rata-rata Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	Peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik	-	-	-	-	-	48.271.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,75	
	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City	-	-	-	-	-	154.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,31	
	Layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah	-	-	-	-	-	2.883.596.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90	
	Layanan infrastruktur dasar Data Center, disaster recovery center dan TIK	-	-	-	-	-	3.207.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,85	
	Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,27	
	Operasional Cirebon Command Center	-	-	-	-	-	98.444.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,01	
XIV	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	66.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,17	
	Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	-	-	-	-	-	66.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,17	
XV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	606.529.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,88	
	Pengolahan, Updading, analisis Data dan statistik Sektoral	-	-	-	-	-	81.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRS	-	-	-	-	-	325.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,28	
	pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	-	-	-	-	-	199.059.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,41	
XVI	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	141.231.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,83	
	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	141.231.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,83	
	JUMLAH	8.902.824.566	5.734.607.568	7.765.233.900	9.268.241.000	16.741.535.300	10.545.864.300	8.688.371.615	5.536.739.563	7.459.511.983	8.864.967.464	15.741.855.008	10.330.310.334	97,6	96,5	96,1	95,6	94,03	97,96			



Pada tabel diatas menunjukkan pagu anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah daerah yang mengakibatkan efisiensi anggaran yang berdampak penurunan pagu anggaran. Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan karena disamping masuknya dana PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) juga ada Bantuan Keuangan dari Provinsi (Tahun 2019). Secara garis besar realisasi anggaran rata-rata tiap tahun diatas 95%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini akan dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2019-2024 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja dengan Data Center yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai syarat utama penerapan SPBE.
- b. Ketersediaan informasi publik di era keterbukaan informasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
- c. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam *West Java Smart Province* dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.



- d. Pesatnya kemampuan *hacker* dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
- e. Belum adanya standar keamanan informasi
- f. Pesatnya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- g. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.

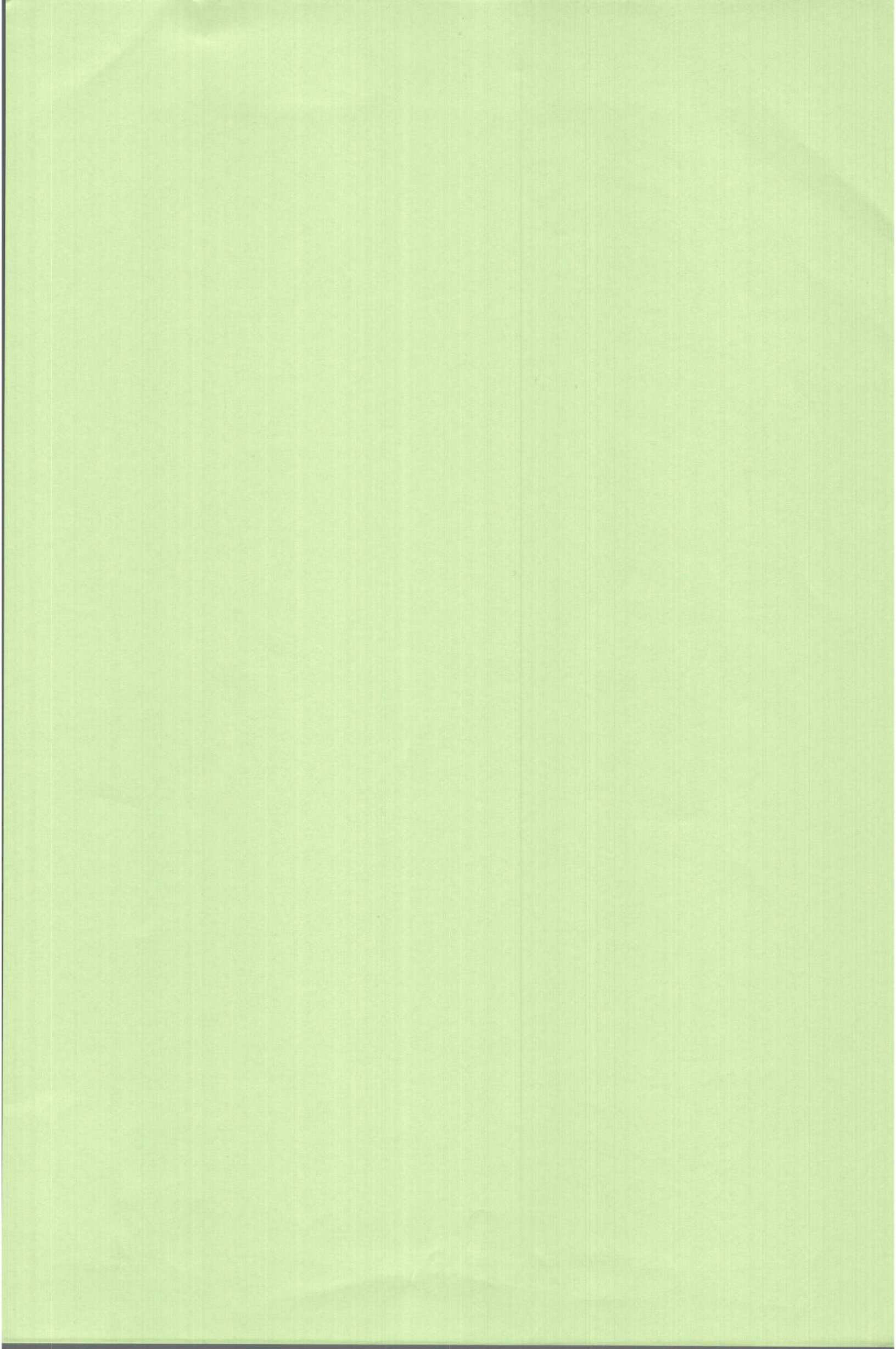
2.4.2 Peluang

Peluang menguntungkan berdasarkan hasil analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah:

- a. Layanan internet pada seluruh ada seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon akan diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon secara satu pintu anggaran sehingga lebih efektif dan efisien.
- b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah berupa Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran serta mengacu kepada implementasi SPBE maka Perangkat Daerah agar menghindari pengembangan dan atau pembangunan ruang server (*Data Center* maupun *Recovery Center*);



- d. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika.
- e. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- f. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.
- g. Adanya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan



tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT 3. Belum disusunnya regulasi dan SOP dalam setiap proses pekerjaannya 4. Tim koordinasi SPBE belum berfungsi secara optimal
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik serta diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i> 2. Masih rendahnya akses publik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i>
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> 2. Kurangnya fasilitas sarana pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah



3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1 Visi

Bupati Cirebon mempunyai visi:

**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon
Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

- a. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA mempunyai makna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- b. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA mempunyai makna meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- c. Kabupaten Cirebon AGAMIS mempunyai makna meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
- d. Kabupaten Cirebon MAJU mempunyai makna meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- e. Kabupaten Cirebon AMAN mempunyai makna memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang



harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman	1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
	2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
	4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
	5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

NO	VISI/MISI	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”</p> <p>Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</p>	Menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal 2. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal 3. Ketersediaan data sektoral belum optimal 4. Pemanfaatan data sektoral belum optimal 5. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi 	<p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal b. Koordinasi internal belum optimal c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai <p>Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan daya saing daerah b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Cirebon



3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan terhadap renstra K/L dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3.3.1 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Tahun 2019-2024 adalah "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomot 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.3.2 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;



2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.4
Telaahan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Belum dijadikan prioritas	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan akan informasi semakin tinggi
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak adanya kewenangan terkait layanan pos	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> nasional	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat mengembangkan NGN	Kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Belum tersedianya standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan Konsumen
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Adanya dokumen dalam mengembangkan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan TIK	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Tersedianya fasilitas digital di beberapa titik lokasi
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Adanya Perda terkait e-government
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Komitmen aparatur	Transparansi kinerja



3.3.3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2018-2023 telah menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi;
4. Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.5
Telaahan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Diskominfo Prov Jabar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai 	Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan daya saing daerah
2.	Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;	Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai 	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik



3.	Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi	Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Cirebon
4.	Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral

3.3.4. TELAHAAN RENSTRA BADAN PUSAT STATISTIK

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Visi Badan Pusat Statistik untuk Tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan indikator



sasaran persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Kab Cirebon terhadap Pelayanan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Pusat Statistik	Permasalahan Layanan Diskominfo Kab. Cirebon	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pengelolaan Data Statistik Sektoral kewenangan BPS	Belum adanya peraturan teknis tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Adanya kepedulian pimpinan terhadap urusan statistik

3.3.5. TELAAHAN RENSTRA LEMBAGA SANDI NEGARA/BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Renstra BSSN tahun 2020-2024 menerapkan visi Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkperibadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika adalah terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.

Tabel 3.6

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Kab Cirebon terhadap Pelayanan sasaran Renstra Lembaga Sandi Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Sandi Negara	Permasalahan Layanan Diskominfo Kab. Cirebon	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Urusan persandian merupakan urusan yang dilaksanakan diskominfo Kab Cirebon sehingga perlu penyesuaian dari semua sumber daya yang ada	Belum adanya tenaga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Adanya kepedulian pimpinan terhadap urusan persandian
			Peralatan persandian yang belum memadai	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Cirebon

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW

Hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Diskominfo. Hasil analisis yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan arah (geografis) dalam pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Diskominfo dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Hasil telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon terhadap kebutuhan pelayanan Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan pelayanan PD
1	Rencana sistem pusat kegiatan a. Sistem perkotaan 1. Pusat kegiatan perkotaan 2. Fungsi pelayanan b. Sistem perdesaan 1. Pusat kegiatan perdesaan 2. Fungsi pelayanan	Pusat kegiatan perkotaan, meliputi: a. Pusat Kegiatan Lokal (Arjawinangun, Palimanan, Sumber, Lemahabang, Ciledug) b. Pusat Pelayanan Kawasan (Gegesik, Kapetakan, Klagenan, Plumbon, Weru, Kedawung, Astanajapura, Karangsembung, Babakan, Losari) Fungsi Pelayanan, meliputi ; a. Kawasan perdagangan, jasa dan pendidikan di Arjawinangun b. Sentra industri dan pergudangan di Palimanan c. Pusat pemerintahan di Sumber d. Industri manufaktur di Lemahabang e. Kawasan pertanian, perdagangan, jasa, pendidikan dan agro industri di Ciledug Pusat kegiatan perdesaan, meliputi: a. Pusat pelayanan lingkungan (Pabedilan, Pabuaran, Waled, Gebang, Pasaleman, Mundu, Pangenan, Sedong, Susukan Lebak, Karangwareng, Beber, Greged, Plered, Tengahtani, Talun, Gunungjati, Jamblang, Depok, Dukupuntang, Gempol, Susukan, Kaliwedi, Pangurangan, Suranenggala, Ciwaringin)	Sistem jaringan telekomunikasi. 1) Pengembangan jaringan telepon	Meningkatkan layanan jaringan telepon dengan pembanguna menara telekomunikasi yang masih blank spot	Setiap kecamatan
2	Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten a. Sistem jaringan prasarana utama 1. Sistem jaringan transportasi darat (jalan tol, arteri, jalan kolektor, terminal, trayek, perkeretaapian) 2. Sistem jaringan transportasi laut (terminal khusus, pelabuhan pengumpul) 3. Sistem jaringan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan, ruang udara untuk penerbangan) b. Sistem jaringan prasarana energi (jaringan pipa minyak dan gas bumi, gardu induk, pembangkit listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, pengembangan energi alternatif) c. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi (jaringan terrestrial atau kabel, nirkabel, satelit) d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air (system wilayah sungai, sumber air dan tampungan air, jaringan irigasi, jaringan air baku, sistem pengendalian banjir, system pengamanan pantai) e. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, air limbah, drainase, air minum, evakuasi bencana)		2) Pengembangan tower bersama	Pembangunan tower bersama di sekitar daerah yang masih blankspot	Setiap kecamatan
			3) Penambahan titik pelayanan akses internet untuk umum (hot spot)	Pembangunan hot spot area publik dalam meningkatkan pelayanan informasi dan pelayanan publik	Kawasan perkantoran, sekitar alun-alun, pasar batik trusmi.



Tabel 3.8
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan pelayanan PD
1	<p>Kawasan lindung</p> <p>a. Kawasan hutan lindung</p> <p>b. Kawasan resapan air</p> <p>c. Kawasan perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none">• Sempadan pantai• Sempadan sungai• Waduk, situ dan embung• Ruang terbuka hijau <p>d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none">• Suaka margasatwa• Cagar budaya dan ilmu pengetahuan• Hutan bakau• Hutan konservasi• Suaka alam dan pelestarian alam <p>e. Kawasan rawan bencana alam</p> <ul style="list-style-type: none">• Rawan tanah longsor• Rawan gelombang pasang• Rawan banjir• Rawan angin rebut• Rawan letusan gunung api ciremai	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan lindung- Perubahan luas kawasan resapan air- Perubahan luas sempadan sungai dan mata air- Perubahan luas ruang terbuka hijau	<p>Kawasan hutan lindung</p> <p>1. Konservasi hutan lindung melalui perencanaan rehabilitasi lahan kritis yang mengalami alih fungsi</p>	-	-



3.4.2 Hasil Telaahan terhadap KLHS

Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta fungsi penunjang pemerintahan yang akan berdampak strategis terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.



3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Domain, Aspek, Indikator

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR
Kebijakan Internal	Kebijakan Tata Kelola SPBE	10
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE	2
	Perencanaan dan Strategi	4
	TIK	4
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen	8
	Audit TIK	3
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan	10
	Layanan Publik	6

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur



derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
2. Terkelola	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.
4. Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.
5. Optimum	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.▪ Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi

Tabel 4.3 Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Layanan

1. Informasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi	<ul style="list-style-type: none">▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	<ul style="list-style-type: none">▪ Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan 3. Transaksi menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4. Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
5. Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal



Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan dan akuntabel**

Untuk mendukung tujuan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan jumlah sasaran. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian	4) Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5) Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	
6) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

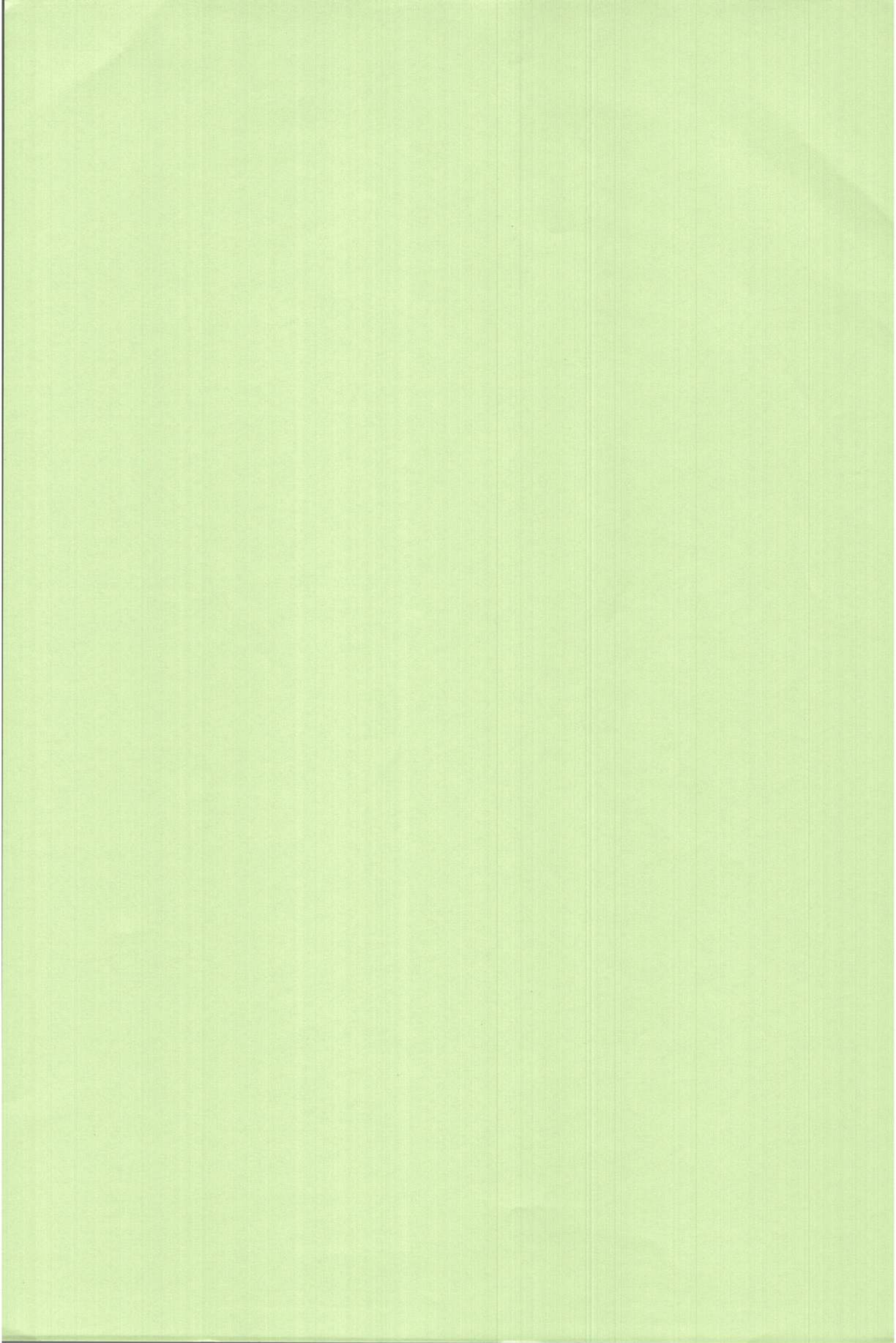
Berdasarkan hasil reviu internal, bahwa dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan target tujuan dan sasaran. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -								Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Akhir Renstra	
					Sebelum perubahan					Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021		2022
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63	2.78	2.93	3.00	3.10	3.20
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.84	3.10	3.30	3.42	3.55	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 PERSEN	55.25	56.63	59.79	61.88	64.05	56.63	40	45	50	57
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 PERSEN	36.50	50	61	76.50	90	40	52.50	65	77.50	90
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	III	III	IV	II	II	II	II	II
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10	9	8	7	6	10	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	- POIN	3.55	3.65	3.85	3.95	4.00	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis menggunakan metode analisis *SWOT* yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga, berdasar pada faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut penentuan, pengambilan, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tabel 5.1
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1	Tersedianya sumber daya aparatur	1	Kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah
2	Tersedianya sarana dan prasarana	2	Sarana dan prasarana belum memadai
3	Adanya tugas pokok dan fungsi	3	Kurangnya koordinasi
4	Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari Pemda dalam mewujudkan masyarakat informasi	4	Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi
6	Adanya jaringan intranet dan internet berbasis Fiber Optik	6	Pemanfaatan jaringan internet dan intranet yang belum optimal
7	Adanya jaringan WAN sampai titik kecamatan dan Kelurahan	7	Pemanfaatan jaringan WAN di tingkat kecamatan belum optimal
8	Perangkat daerah telah memiliki infrastruktur yang memadai	8	Belum adanya kebijakan tertulis pemanfaatan infrastruktur dalam bentuk SOP
9	Hampir semua perangkat daerah memiliki perangkat TIK	9	Spesifikasi perangkat TIK yang harus ditingkatkan
10	Tersedianya tenaga instruktur bidang kerja kominfo	10	Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah/kurang

Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman/Tantangan (Threats)
1	Tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika	1	Ditetapkannya SPBE sebagai indikator kinerja daerah
2	Adanya kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia	2	Belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah
3	Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik	3	Ketersediaan informasi publik yang cepat dan mudah
4	Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai	4	Pesatnya kemampuan hacker
5	Kemampuan dan daya gunaperangkat keras semain canggih	5	Keterbatasan SDM untuk menguasai perangkat keras dan perangkat jaringan

Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya ketersediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif khususnya pada keterbukaan informasi publik. Informasi publik berpengaruh terhadap penilaian kinerja publik pada implementasi kebijakan-kebijakan daerah yang tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 5.2.



Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Visi		: Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman		
Misi IV		: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon

Adapun keterkaitan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

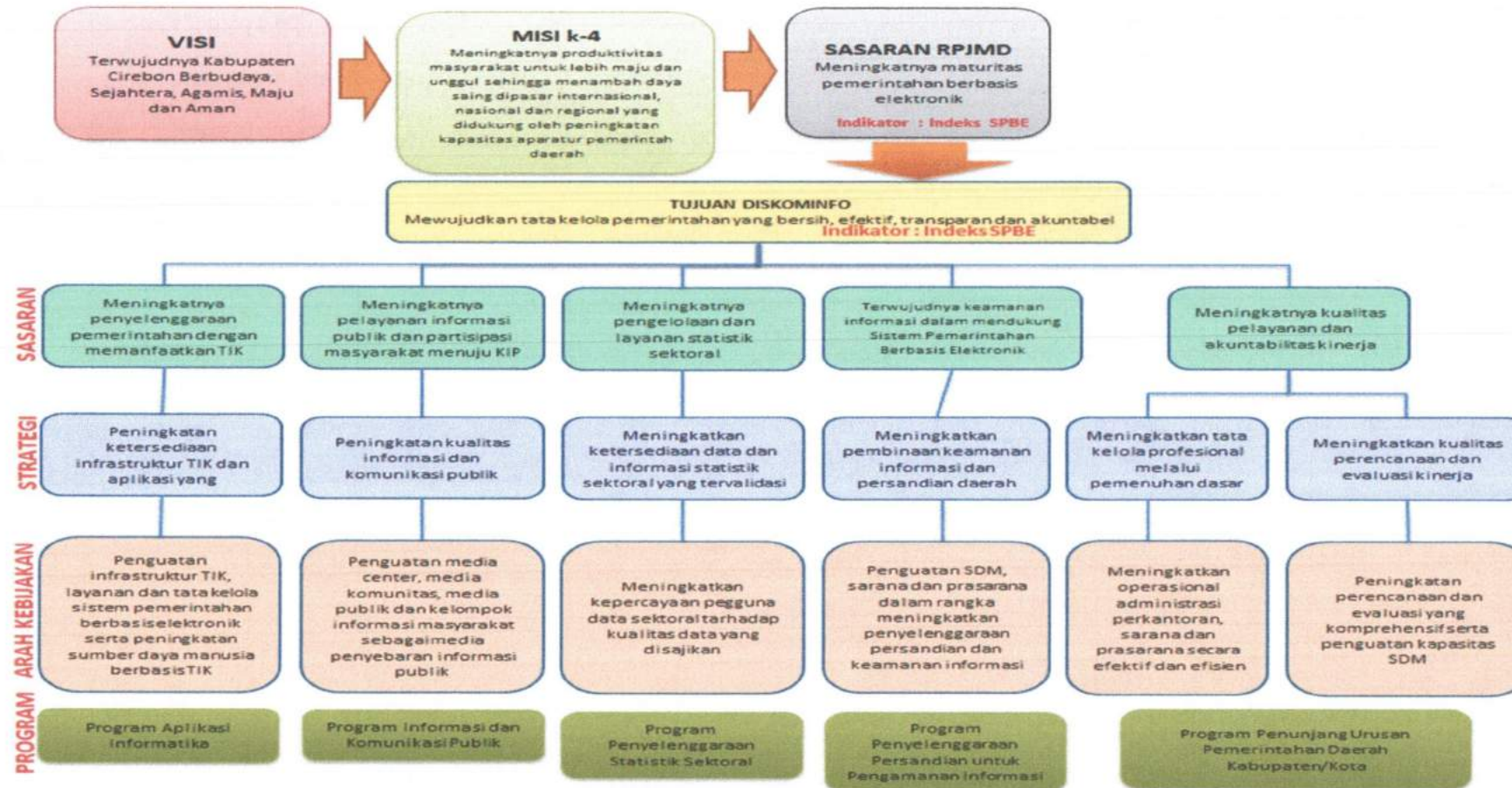


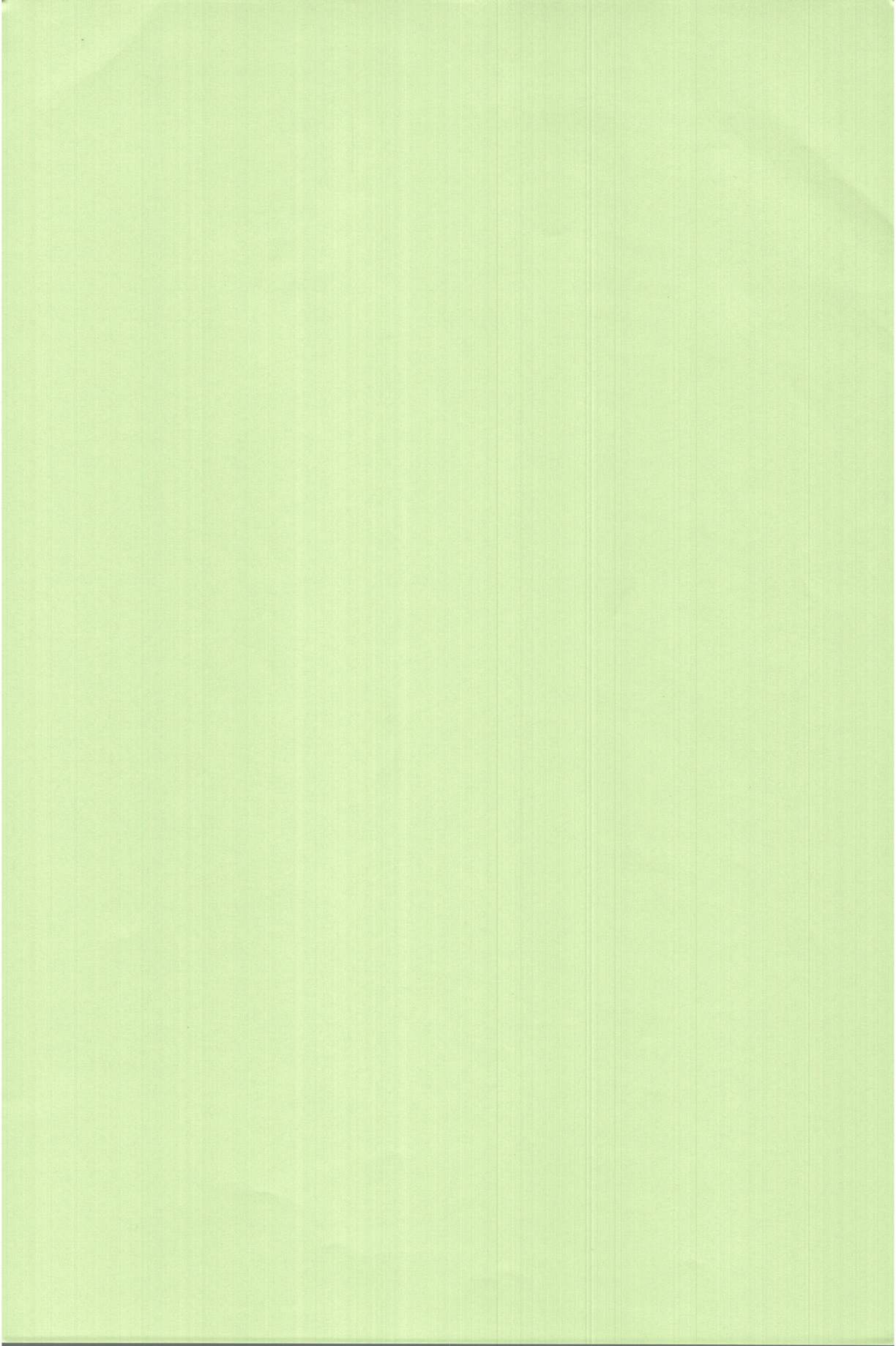
Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (IKU)	Program
Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Program Aplikasi Informatika
			Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan layanan statistik daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo digambarkan pada *cascading* berikut :



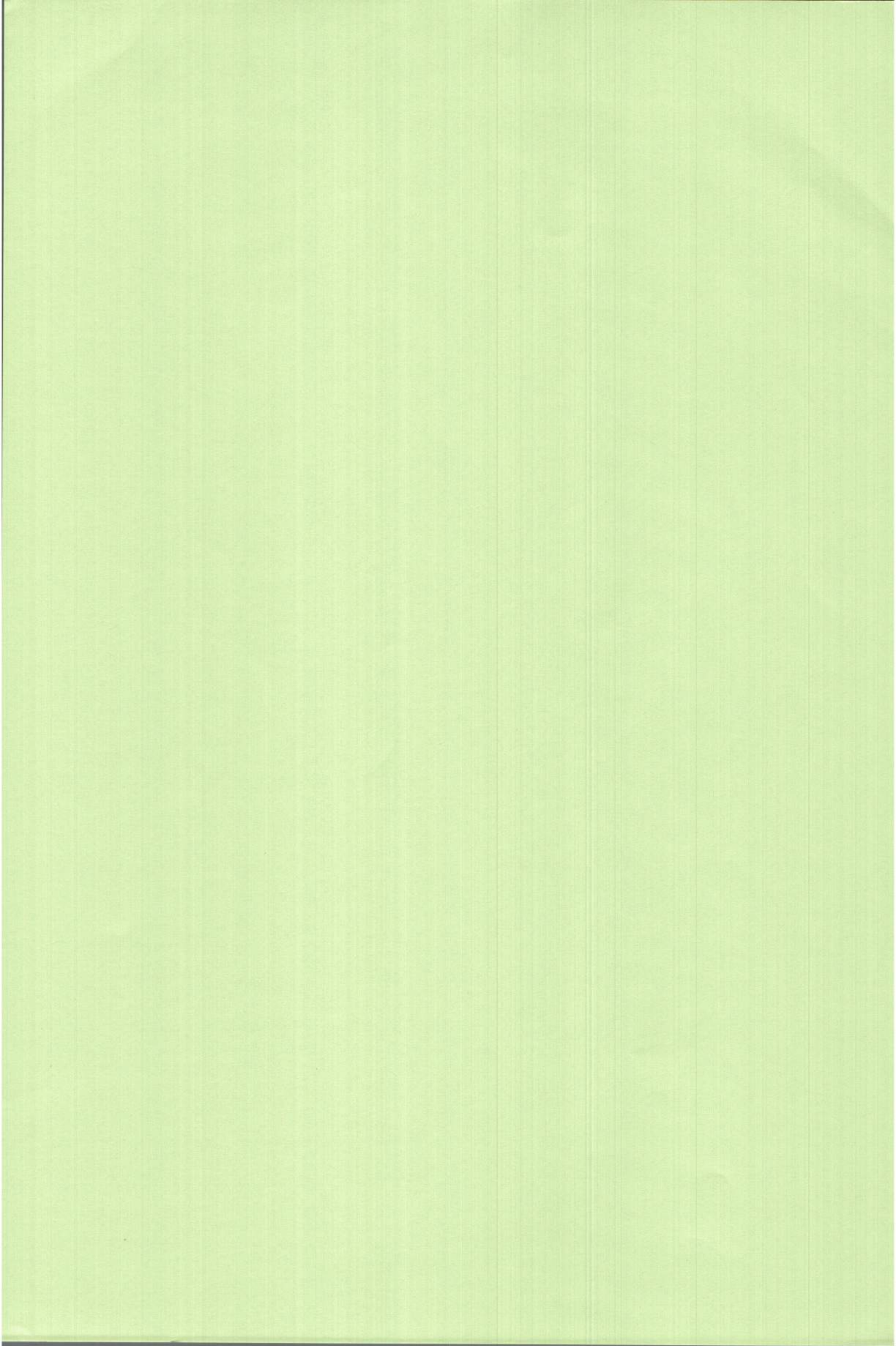




BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang direncanakan untuk periode tahun 2020–2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1. (terlampir)





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yaitu :

- **Misi Keempat** : Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
- **Tujuan** : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi desa
- **Sasaran** : Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik



Berikut indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang merupakan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tabel 7.1.
Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika / Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja				Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks SPBE	Poin	2.89	2.89	2.93	3.00	3.10	3.20	3.20

Sementara indikator kinerja yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja				Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Domain SPBE	Poin	2.57	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97	2.97

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disamping sebagai Perangkat Daerah penanggungjawab terpenuhinya target Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, juga berkewajiban memenuhi target 5 (lima) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja				Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan Informasi Publik	POIN	55.25	31.87	40	45	50	57	57
2.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	%	40	58.05	52.50	65	77.50	90	90
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	LEVEL	II	II	II	II	II	II	II
4.	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	%	n/a	10	-	-	-	-	-
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	3.25	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63	3.63



Berdasarkan Permenpan RB No 18 Tahun 2020, bahwa Dinas Komunikasi dan informatika berkewajiban memenuhi indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika
yang Mengacu Permenpan RB No 18 Tahun 2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
IKK OUTCOME								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	60%	65%	70%	75%	80%	80%
IKK OUTPUT								
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)	n/a	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
8	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
9	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	n/a	11 %	12 %	13 %	15 %	16 %	16%
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
15	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
16	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	n/a	ada	ada	ada	ada	ada	ada
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
URUSAN STATISTIK								
IKK OUTCOME								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
IKK OUTPUT								
1	Tersedianya buku profil daerah	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	n/a	-	-	-	-	-	-
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	n/a	-	-	-	-	-	-
URUSAN PERSANDIAN								
IKK OUTCOME								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	n/a	5%	6%	7%	8%	9%	9%
IKK OUTPUT								
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	n/a	50%	55%	60%	65%	70%	70%
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	n/a	50%	55%	60%	65%	70%	70%
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	n/a	50%	55%	60%	65%	70%	70%
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	n/a	9,5%	12%	15%	18%	21%	21%



Tabel 7.5.
Indikator SDGs dan Target Capaian SDGs
yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

	Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global							
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Orang	300	45	210	390	400	410
II	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
III	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
1	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	87	87	87	87	87	87
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	PPID	76	76	76	76	76	76
4	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
IV	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
1	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



Tabel 7.6
Formulasi Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Formulasi	Capaian	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ Ket : Penilaian dari 3 indikator yang dikaji : 1. Kebijakan internal 2. Tata kelola SPBE 3. Manajemen SPBE 4. Layanan SPBE (Hasil evaluasi KEMENPAN RB Permenpan RB No 59 Tahun 2020)	2.89	2.93	3.00	3.10	3.20	



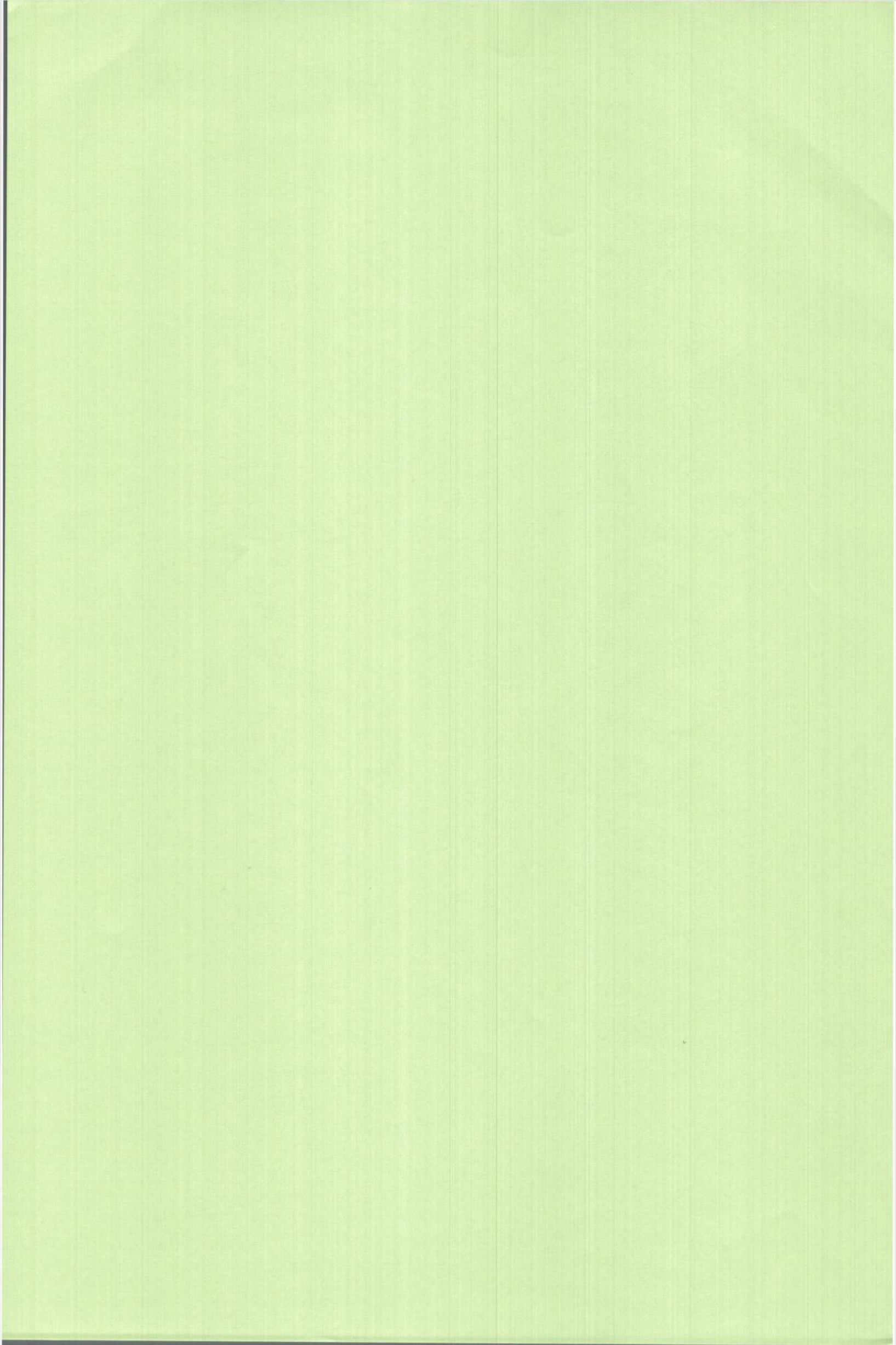
Tabel 7.7
Formulasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Formulasi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ (Hasil evaluasi KEMENPAN RB)	2.57 POIN	2.67	2.77	2.87	2.97
Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{(\text{verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total komponen}}$ (Hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat) Ket : SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak	56.63 POIN	40	45	50	57
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	$\frac{(\% \text{dokumen yang dihasilkan} + \% \text{keterisian data SIPD})}{\text{Total komponen}} \times 100\%$	40 %	52.50	65	77.50	90
Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	II LEVEL	II	II	II	II
Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	$\frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang diadukan}}{\sum \text{menara telekomunikasi}}$	10 %	-	-	-	-
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang professional	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Total dari persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	3.55 POIN	3.57	3.59	3.61	3.63



Tabel 7.8
Formulasi Perhitungan Indikator Program Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Program	Formulasi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informastika	$\frac{\sum \text{capaian indikator kegiatan}}{\sum \text{target indikator kegiatan}}$	80%	85.5%	88%	91%	94%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	$\frac{\sum \text{masyarakat yang menjadi sasaran penebaran informasi publik}}{\sum \text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	60%	65%	70%	75%	80%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\sum \text{jumlah OPD yang menggunakan statistik dalam perencanaan}}{\sum \text{jumlah OPD}} \times 100\%$	20%	40%	60%	80%	100%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	$\frac{\sum \text{jumlah PD yang telah melaksanakan tanda tangan elektronik}}{\sum \text{total PD}} \times 100\%$	6%	26%	30%	36%	42%
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{pelayanan yang disediakan}}{\sum \text{pelayanan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{sarana dan prasarana yang dibutuhkan}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	$\frac{\sum \text{Aparatur yang disiplin}}{\sum \text{Aparatur}} \times 100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	$\frac{\sum \text{dokumen capaian kinerja tepat waktu dan sesuai peraturan perundang - undangan}}{\sum \text{dokumen capaian kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang - undangan}}{\sum \text{dokumen perencanaan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

8.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika. Perubahan Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Perubahan Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Perangkat Daerah yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon

2019-2024. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 2) Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 3) Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun.

8.3 RENCANA TINDAK LANJUT

- 1) Menjadikan *local government* (Pemerintahan Kabupaten Cirebon) sebagai pengelola dan koordinator jaringan internet dan pusat *database* Kabupaten.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang teknologi informasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 3) Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi sampai ke tingkat Desa.
- 4) Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah.
- 5) Pengembangan *content Website* dan Implementasi *e-government* Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang meliputi sistem aplikasi perangkat daerah baik secara intranet maupun internet.
- 6) Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian

Demikian, semoga perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI

Demikian, semoga perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI

LAMPIRAN

TABEL B.46



**RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN										
4	MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH									
4.1		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,63 POIN	2,78	2,93	3,00	3,10	3,20	3,20
4.1.1		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 POIN	2,57	2,67	2,77	2,87	2,97	2,97
4.1.2		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,52 POIN	56,63	40,00	45,00	50,00	57,00	57,00
4.1.3		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 PERSEN	40,00	52,50	65,00	77,50	90,00	90,00
4.1.4		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,00 LEVEL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4.1.5		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10,00 PERSEN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.1.6		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 POIN	3,55	3,57	3,59	3,61	3,63	3,63

Sumber, 04 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SUGENG DARSONO, SH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

TABEL C.25



**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,78 POIN	2,93	3,00	3,10	3,20
4.1.1.		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 POIN	2,67	2,77	2,87	2,97
4.1.2.		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56,63 POIN	40,00	45,00	50,00	57,00
4.1.3.		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40,00 PERSEN	52,50	65,00	77,50	90,00
4.1.4.		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,00 LEVEL	2,00	2,00	2,00	2,00
4.1.5.		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10,00 PERSEN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,55 POIN	3,57	3,59	3,61	3,63

Sumber, 04 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

TABEL C.26



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI 4: Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Penguatan SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif serta penguatan kapasitas SDM

TABEL C.27



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,63 POIN	2,78	26.368.402.000	2,93	40.508.154.800	3	44.466.004.800	3,1	50.774.800.000	3,2	46.528.600.000	3,2	208.645.961.600		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 POIN	2,57	14.230.000.000	2,67	21.521.000.000	2,77	28.130.800.000	2,87	28.210.800.000	2,97	28.240.800.000	2,97	120.333.400.000		
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	2,67 POIN	2,97	14.210.000.000	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	3	14.360.000.000			
				Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	0 Persen	0	20.000.000	85,5	21.371.000.000	88	28.130.800.000	91	28.210.800.000	94	28.240.800.000	94	105.973.400.000			
		03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0 Perangkat daerah	73	3.555.000.000	73	5.170.000.000	73	12.580.800.000	73	12.580.800.000	73	12.580.800.000	365	46.467.400.000			
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	0 Domain	0	3.555.000.000	0	5.170.000.000	1	12.580.800.000	1	12.580.800.000	1	12.580.800.000	3	46.467.400.000			
		03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain	1 Domain	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon		
				Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain	0 Domain	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	50.000.000				
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara	0 Subdomain	0	0	15	250.000.000	0	0	0	0	0	15	250.000.000				
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	0 kali	0	0	26	50.000.000	0	0	0	0	0	26	50.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	0 Domain	0	0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	170.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	0 Kali	0	0	0	60	98.000.000	60	98.000.000	60	98.000.000	180	294.000.000			
		03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet, jumlah downliine akses dan jumlah penerima akses	1 layanan	1	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	0 Perangkat daerah	0	0	73	800.000.000	73	4.000.000.000	73	4.000.000.000	73	4.000.000.000	73	12.800.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	0 Perangkat daerah	73	5.000.000	73	2.550.000.000	0	0	0	0	0	73	2.555.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	100.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	39	1.600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan Fiber Optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	12	150.000.000	0	0	0	0	0	12	150.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	100.000.000	12	500.000.000	2	500.000.000	12	500.000.000	29	1.600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	12	300.000.000	0	0	0	0	0	12	300.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik)	0 Unit	0	0	20	100.000.000	55	500.000.000	60	500.000.000	65	500.000.000	200	1.600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan	0 Unit	0	0	50	200.000.000	0	0	0	0	0	0	50	200.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN)	0 Unit	0	0	20	100.000.000	50	500.000.000	55	500.000.000	60	500.000.000	185	1.600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan	0 Unit	0	0	45	300.000.000	0	0	0	0	0	0	45	300.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah titik hotspot area publik yang dibangun	0 Titik	0	0	0	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	45	1.500.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah	0 Perangkat Daerah	0	0	73	100.000.000	0	0	0	0	0	0	73	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengendalian Bandwidth dan monitoring jaringan TIK (Belanja sewa fiber optik)	0 Titik	0	0	0	412	5.932.800.000	412	5.932.800.000	412	5.932.800.000	412	17.798.400.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0 layanan	9	10.675.000.000	9	16.351.000.000	9	15.550.000.000	9	15.630.000.000	9	15.660.000.000	9	73.866.000.000		
		03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi dan kebijakan mengenai domain dan indeks SPBE	0 Regulasi	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi e-government	0 Regulasi	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen perencanaan e-government	0 Dokumen	0	0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	2	150.000.000		
				Jumlah regulasi yang terbit dalam mendukung Implementasi e-government	0 Dokumen	0	0	0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	450.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah dokumen perencanaan e-government	0 Dokumen	0	0	1	50.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	4	1.400.000.000		
		03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center	1 layanan	1	305.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	30.000.000	12	400.000.000	2	400.000.000	12	400.000.000	29	1.230.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center	0 layanan	1	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah pengelolaan suku cadang NOC	0 Unit	0	0	20	200.000.000	55	400.000.000	65	400.000.000	75	400.000.000	215	1.400.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	0 Persen	0	0	71	9.500.000.000	0	0	0	0	0	0	71	9.500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	0 Perangkat Daerah	0	0	73	70.000.000	73	7.500.000.000	73	7.500.000.000	73	7.500.000.000	73	22.570.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan NOC	0 Bulan	12	5.000.000	12	400.000.000	0	0	0	0	0	0	24	405.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC)	0 DRC	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan	0 Unit	32	5.000.000	45	400.000.000	0	0	0	0	0	0	45	405.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses	0 Sistem informasi	5	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	150.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	0 Persen	0	0	26	50.000.000	0	0	0	0	0	0	26	50.000.000		
				Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi	0 Aplikasi	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		
				Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat	0 orang	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100	50.000.000		
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	0	0	1	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	16	1.200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	0 kegiatan	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0 sarana media	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	0 Kegiatan	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0 Sistem informasi	0	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	0 Kegiatan	0	0	1	10.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	7	310.000.000		
				Jumlah monitoring dan evaluasi SPBE	0 Kegiatan	0	0	0	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.000.000.000		
		03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	0 Aplikasi	2	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	250.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city	0 aplikasi	0	0	4	250.000.000	0	0	0	0	0	0	4	250.000.000		
				Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik	0 Aplikasi	0	0	2	200.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	17	2.000.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi	0 Layanan Publik	2	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	700.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya fasilitas operasional Cirebon Katon Respon 112	0 Kegiatan	0	0	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	4	5.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0 Persen	0	0	26	300.000.000	0	0	0	0	0	0	26	300.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah titik pembangunan CCTV, videotron, video conference dan kelengkapannya	0 Lokasi	0	0	10	500.000.000	10	2.500.000.000	10	2.500.000.000	10	2.500.000.000	40	8.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon	0 Aplikasi	0	0	3	450.000.000	0	0	0	0	0	0	3	450.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah lain	0 tahun	0	0	1	71.000.000	0	0	0	0	0	0	1	71.000.000		
		03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City	1 kegiatan	1	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	0 Persen	62	5.000.000	71	60.000.000	0	0	0	0	0	0	71	65.000.000		
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	0 Orang	0	0	60	100.000.000	0	0	0	0	0	0	60	100.000.000		
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	0 Orang	0	0	70	30.000.000	70	100.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	310	330.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	0 Perangkat Daerah	0	0	3	70.000.000	3	70.000.000	6	80.000.000	9	90.000.000	9	310.000.000		
		03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur SDM TIK pemerintah daerah tersertifikasi	0 orang	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek	0 orang	110	350.000.000	100	150.000.000	0	0	0	0	0	210	500.000.000			
				Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	0 Orang	0	0	80	100.000.000	0	0	0	0	0	0	80	100.000.000		
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Orang	0	0	130	350.000.000	0	0	0	0	0	130	350.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Orang	0	0	0	0	140	280.000.000	150	300.000.000	160	320.000.000	450	900.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	0 Orang	0	0	210	40.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000	960	640.000.000		
		03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi kompetensi GCIO	0 orang	7	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi GCIO	0 Orang	0	0	10	120.000.000	0	0	0	0	0	0	10	120.000.000		
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat kompetensi GCIO	0 Orang	0	0	0	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	45	300.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
			Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,52 POIN	56,63	3.030.000.000	40	6.728.000.000	45	4.415.000.000	50	4.625.000.000	57	4.935.000.000	57	23.733.000.000		
		02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	52,5 Persen	52,5	3.030.000.000	0	495.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.525.000.000		
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	0 Persen	60	0	65	6.233.000.000	70	4.415.000.000	75	4.625.000.000	80	4.935.000.000	80	20.208.000.000		
		02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	0 Media	5	3.030.000.000	5	6.728.000.000	5	4.415.000.000	5	4.625.000.000	5	4.935.000.000	5	23.733.000.000		
		02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik	0 tahun	1	70.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	2	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kebijakan teknis daerah (Perbup dan/ Keputusan Bupati dan/ Keputusan Kadis) bidang informasi dan komunikasi publik yang diterbitkan	0 Kebijakan	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah bidang informasi dan komunikasi publik	0 Regulasi	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis	0 Rekomendasi	0	0	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	4	220.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional	0 Kegiatan	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik	0 paket	1	150.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	155.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak	0 Layanan	0	0	0	0	26	45.000.000	26	45.000.000	26	45.000.000	78	135.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media online	0 Layanan	0	0	0	0	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	240.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media online	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat	0 Layanan	0	0	0	0	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	200 konten	365	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	365	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	0 Konten	0	0	90	50.000.000	365	300.000.000	365	300.000.000	365	300.000.000	1.185	950.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	0 Konten	0	0	365	400.000.000	0	0	0	0	0	0	365	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola	1 media	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	0 Eksemplar	0	0	1.200	100.000.000	3.430	250.000.000	3.430	250.000.000	3.430	250.000.000	11.490	850.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	0 Eksemplar	0	0	3.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000	250.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	0 Lembar	0	0	0	0	2.000	60.000.000	2.000	60.000.000	2.000	60.000.000	6.000	180.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	0 Lembar	0	0	2.000	50.000.000	0	0	0	0	0	2.000	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
		02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	2 layanan	4	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas dan mempunyai sertifikat untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	0 orang PPID	0	0	85	120.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	100	150.000.000	360	570.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	0 Badan Publik	0	0	76	100.000.000	0	0	0	0	0	76	100.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	0 Kali	0	0	0	0	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	50.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	0 Kali	0	0	12	20.000.000	0	0	0	0	0	12	20.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	0 Kali	0	0	10	5.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	118	65.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terlaksananya penyebaran informasi melalui wawar keliling	0 Kali	0	0	36	20.000.000	0	0	0	0	0	0	36	20.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	0 Publikasi	0	0	3	300.000.000	13	400.000.000	14	400.000.000	15	400.000.000	45	1.500.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	0 publikasi	0	0	12	360.000.000	0	0	0	0	0	12	360.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	0 Publikasi	0	0	30	100.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	330	470.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	0 Publikasi	0	0	100	150.000.000	0	0	0	0	0	100	150.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0 layanan	0	0	0	0	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	2 media	1	460.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	0 Terbit	0	0	20	600.000.000	180	1.500.000.000	180	1.700.000.000	180	2.000.000.000	560	5.800.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	0 Terbit	0	0	130	950.000.000	0	0	0	0	0	130	950.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	0 Tayang	0	0	5	20.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	41	200.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	0 Tayang	0	0	12	90.000.000	0	0	0	0	0	12	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	0 Tayang	0	0	0	0	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	36	210.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	0 Tayang	0	0	12	90.000.000	0	0	0	0	0	12	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
		02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	0 paket	1	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	230.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/bimtek bidang komunikasi dan informasi	0 Orang	0	0	0	0	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	450	300.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	0 Kegiatan	0	0	3	400.000.000	0	0	0	0	0	3	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah peserta yang memiliki inovasi dalam websitenya dan mengikuti ajang Diskominfo Awards	0 Orang	0	0	0	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	300	180.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat	0 orang	0	0	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	800	1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon	1 tahun	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya	0 Bulan	0	0	3	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	39	1.600.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	0 Persen	0	0	85	375.000.000	0	0	0	0	0	0	85	375.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	0 Komisioner	0	0	5	210.000.000	0	0	0	0	0	0	5	210.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	2 media	2	470.000.000	2	470.000.000	0	0	0	0	0	0	4	940.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	3	400.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	27	1.300.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	6	188.000.000	0	0	0	0	0	0	6	188.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,5 PERSEN	40	740.617.000	52,5	2.730.000.000	65	1.540.000.000	77,5	2.560.000.000	90	3.100.000.000	90	10.670.617.000			
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	20 PERSEN	20	467.617.000	0	368.000.000	0	0	0	0	0	0	0	835.617.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	60 PERSEN	60	273.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.000.000		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0 Persen	0	0	40	2.362.000.000	60	1.540.000.000	80	2.560.000.000	100	3.100.000.000	100	9.562.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0 perangkat daerah	32	740.617.000	32	2.730.000.000	31	1.540.000.000	31	2.560.000.000	31	3.100.000.000	31	10.670.617.000		
		02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	1 Dok	1	99.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.617.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah buku statistik daerah/profil daerah	0 Dokumen	0	0	1	80.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	4	410.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah	0 Dok	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi statistik sektoral	0 tahun	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0 Jenis	0	0	1	40.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	640.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun	0 Persen	0	0	25	150.000.000	0	0	0	0	0	0	25	150.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Persentase ketersediaan data yang dikelola	60 Prosen	60	213.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah aplikasi satu data yang dibangun dan dikembangkan	0 Aplikasi	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan	0 Aplikasi	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah	0 data	0	0	1.350	90.000.000	1.457	250.000.000	1.561	250.000.000	1.665	250.000.000	1.665	840.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola	0 Persen	0	0	65	200.000.000	0	0	0	0	0	0	65	200.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah IKM yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Survey	0	0	1	320.000.000	3	780.000.000	4	1.800.000.000	5	2.340.000.000	13	5.240.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	1 dokumen	1	368.000.000	1	368.000.000	0	0	0	0	0	0	2	736.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen IPM yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen SUSEDA yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen NTP yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	0 Dokumen	0	0	1	1.182.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.182.000.000		
			Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2 LEVEL	2	1.170.000.000	2	1.365.000.000	2	2.050.000.000	2	2.050.000.000	2	2.050.000.000	2	8.685.000.000		
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0 PERSEN	6	1.170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000.000			
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	0 Persen	56,4	0	56,6	1.365.000.000	56,8	2.050.000.000	57	2.050.000.000	57,2	2.050.000.000	57,2	7.515.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	0 sistem elektronik	0	1.070.000.000	0	1.050.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	6.470.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	0 paket	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	600.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen kebijakan teknis persandian dalam pengamanan informasi	0 Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	0 Paket	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	0 Paket	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah koordinasi bidang persandian yang terfasilitasi	0 tahun	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah aplikasi yang diamankan	0 Aplikasi	0	0	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	30	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah sosialisasi/bimtek melalui sertifikat elektronik	0 kegiatan	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah manajemen akses dan identitas yang dikelola	0 Dokumen	0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi	0 Regulasi	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah anti malware yang disediakan	0 Paket	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan keamanan informasi	0 layanan	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik	0 Kegiatan	0	0	1	60.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	40	960.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik	0 kegiatan	0	0	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	0 Kali	0	0	80	40.000.000	120	300.000.000	120	300.000.000	120	300.000.000	440	940.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	40 Kali	0	0	120	300.000.000	0	0	0	0	0	120	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
		02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	0 Titik	0	100.000.000	8	315.000.000	15	600.000.000	23	600.000.000	31	600.000.000	31	2.215.000.000		
		02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring sandi	0 kegiatan	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya	0 Bulan	0	0	3	115.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	39	415.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel	0 Bulan	0	0	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	12	30.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	0 Kegiatan	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan Sumber)
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	0 Kegiatan	0	0	2	70.000.000	0	0	0	0	0	0	2	70.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan jaringan fiber optik Ophc Oit (jaringan komunikasi Perangkat Daerah berstandar keamanan persandian)	0 Perangkat Daerah	0	0	0	10	400.000.000	10	400.000.000	13	400.000.000	33	1.200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
			Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10		0		0		0		0		10			
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 POIN	3,55	7.197.785.000	3,57	8.164.154.800	3,59	8.330.204.800	3,61	13.329.000.000	3,63	8.202.800.000	3,63	45.223.944.600		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	75 PERSEN	80	1.536.700.000	85	1.621.504.800	90	1.688.704.800	95	1.793.000.000	100	1.846.000.000	100	8.485.909.600		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75 PERSEN	80	881.000.000	85	1.585.650.000	90	1.363.500.000	95	6.174.000.000	100	745.800.000	100	10.749.950.000		
				Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	75 PERSEN	0	53.000.000	100	53.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	63.000.000	100	285.000.000		
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	100	4.607.085.000	100	4.784.000.000	100	4.975.000.000	100	5.179.000.000	100	5.393.000.000	100	24.938.085.000		
				Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	100	120.000.000	100	120.000.000	100	245.000.000	100	125.000.000	100	155.000.000	100	765.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	0 Dokumen	12	120.000.000	14	120.000.000	15	245.000.000	14	125.000.000	15	155.000.000	70	765.000.000		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	3	75.000.000	11	255.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 dokumen	10	75.000.000	12	75.000.000	13	200.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	59	510.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	0 Dokumen	14	4.607.085.000	14	4.784.000.000	14	4.975.000.000	14	5.179.000.000	14	5.393.000.000	70	24.938.085.000		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	23	4.561.085.000	23	4.738.000.000	23	4.928.000.000	23	5.131.000.000	23	5.345.000.000	23	24.703.085.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	5	67.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen	13	33.000.000	13	33.000.000	13	34.000.000	13	34.000.000	13	34.000.000	65	168.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	0 Jenis	1	53.000.000	1	53.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	63.000.000	5	285.000.000		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya	59 stel	60	53.000.000	60	53.000.000	60	58.000.000	60	58.000.000	60	63.000.000	60	285.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	0 Layanan	9	721.700.000	9	763.700.000	9	810.900.000	9	843.000.000	9	876.000.000	45	4.015.300.000		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah lampu yang disediakan	0 buah	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	400	40.000.000		
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 jenis	4	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	100	1.500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	3	25.000.000	1	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	99.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya	0 liter	0	0	331,2	4.000.000	331,2	4.000.000	331,2	4.000.000	331,2	4.000.000	1.324,8	16.000.000		
				Tersedianya isi ulang tabung gas	0 Tabung	0	0	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	48	10.000.000		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai	0 dus	0	0	800	8.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	3.200	32.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 jenis	12	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.700.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan	0 paket	0	0	12	19.700.000	12	19.900.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48	79.600.000		
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional	0 Eksemplar	0	0	5.280	36.000.000	5.280	36.000.000	5.280	40.000.000	5.280	45.000.000	21.120	157.000.000		
				Jumlah penyediaan jasa publikasi melalui surat kabar	0 publikasi	0	0	0	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	15	60.000.000		
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	38 jenis	32	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan	0 paket	0	0	12	57.000.000	12	59.000.000	12	62.000.000	12	65.000.000	48	243.000.000		
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	766 dus	1.300	13.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	4.500	45.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0 Laporan	140	275.000.000	160	300.000.000	180	325.000.000	200	350.000.000	220	375.000.000	900	1.625.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan	0 Jenis	2	536.000.000	2	690.000.000	2	970.000.000	1	975.000.000	2	545.000.000	9	3.716.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1 Unit	1	350.000.000	2	500.000.000	3	775.000.000	0	775.000.000	1	320.000.000	7	2.720.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 jenis	7	186.000.000	8	190.000.000	8	195.000.000	8	200.000.000	8	225.000.000	39	996.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	0 jenis	6	815.000.000	6	857.804.800	6	877.804.800	6	950.000.000	6	970.000.000	30	4.470.609.600		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	4 jenis	3	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	0 Tagihan	0	0	36	380.000.000	36	400.000.000	36	420.000.000	36	440.000.000	144	1.640.000.000		
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya	12 orang	4	5.000.000	4	97.804.800	4	97.804.800	4	110.000.000	4	110.000.000	4	420.609.600	SEKRETARIAT DISKOMINFO	
				Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan	3 orang	3	180.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	980.000.000		
				Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1.896 M2	1.896	180.000.000	1.896	190.000.000	1.896	190.000.000	1.896	210.000.000	1.896	210.000.000	1.896	980.000.000		
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 Gedung	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75.000.000		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	0 jenis	8	345.000.000	8	895.650.000	8	393.500.000	8	5.199.000.000	8	200.800.000	40	7.033.950.000		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar	100 Unit	15	100.000.000	15	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	48	150.000.000		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	21 Unit	22	13.000.000	22	13.650.000	23	14.500.000	23	15.000.000	24	15.800.000	114	71.950.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis	5	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kab Cirebon
				Jumlah pemeliharaan AC	0 kali	0	0	15	13.000.000	20	14.000.000	25	14.000.000	25	15.000.000	85	56.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pemeliharaan komputer	0 kali	0	0	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	60	32.000.000		
				Jumlah pemeliharaan printer	0 kali	0	0	10	7.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	40	31.000.000		
				Jumlah pemeliharaan kamera	0 kali	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	8	8.000.000		
				Jumlah pemeliharaan scanner	0 kali	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	8	8.000.000		
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 Paket	1	200.000.000	1	750.000.000	1	195.000.000	1	5.000.000.000	0	0	4	6.145.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
TOTAL PENDANAAN							26.368.402.000		40.508.154.800		44.466.004.800		50.774.800.000		46.528.600.000		208.645.961.600		

Sumber, 04 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

TABEL
INDIKATOR PERANGKAT DAERAH



**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	POIN	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government (2022-2024)	2,63	2,78	2,93	3	3,1	3,2	3,2	Hasil evaluasi Menpan RB dari nilai 4 indikator yang dikaji berdasarkan Permendagri No 59/2020 : 1. Kebijakan internal 2. Tata kelola SPBE 3. Manajemen SPBE 4. Layanan SPBE
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi			Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	POIN	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government (2022-2024)	2,57	2,57	2,67	2,77	2,87	2,97	2,97	Hasil Self Assesment dan Observasi dari Kemenpan RB terkait evaluasi domain tata kelola SPBE	
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	Merupakan aspek dari domain tata kelola SPBE dengan fokus pada peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	POIN	Bidang Aplikasi Informatika	2,67	2,97	3	0	0	0	3	Hasil penilaian dari kemenpan RB terkait infrastruktur TIK	
				Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika terdiri dari kualitas penerapan tata kelola SPBE, penguatan infrastruktur, manajemen SPBE dan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	$= \text{Jumlah capaian indikator kegiatan} / \text{Jumlah target indikator kegiatan} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Teknologi dan Informatika (2022-2024) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government (2022-2024)	0	0	85,5	88	91	94	94		
		03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain					Domain		1	1	0	0	0	0	1	Teregistrarnya domain utama www.cirebonkab.go.id
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	Belanja sewa domain.go.id pemerintah daerah Kabupaten Cirebon				Domain		0	0	1	1	1	1	4	
				Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain					Domain		0	0	1	0	0	0	1	
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik					Kali		0	0	0	60	60	60	180	
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara					Subdomain		0	0	15	0	0	0	15	
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik					kali		0	0	26	0	0	0	26	
		03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet, jumlah downline akses dan jumlah penerima akses					layanan		1	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	Penyediaan jaringan internet dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon				Perangkat daerah		0	0	73	73	73	73	73	
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	Penyediaan bandwidth sebagai sarana SPBE				Perangkat daerah		0	73	73	0	0	0	73	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	Dalam rangka kelancaran jaringan internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon				Bulan		0	0	3	12	12	12	39		
				Jumlah pemeliharaan Fiber Optik yang difasilitasi Dinas Kominfo					Bulan		0	0	12	0	0	0	12		
				Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	Dalam rangka kelancaran jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon				Bulan		0	0	3	12	2	12	29		
				Jumlah pemeliharaan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo					Bulan		0	0	12	0	0	0	12		
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik)					Unit		0	0	20	55	60	65	200		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan					Unit		0	0	50	0	0	0	50		
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN)					Unit		0	0	20	50	55	60	185		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan					Unit		0	0	45	0	0	0	45		
				Jumlah titik hotspot area publik yang dibangun	Pembangunan hotspot di area strategis di wilayah Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan Cirebon Smart Regency				Titik		0	0	0	15	15	15	45		
				Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah					Perangkat Daerah		0	0	73	0	0	0	73		
				Pengendalian Bandwidth dan monitoring jaringan TIK (Belanja sewa fiber optik)					Titik		0	0	0	412	412	412	412		
		03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi dan kebijakan mengenai domain dan indeks SPBE					Regulasi		0	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah regulasi yang terbit dalam mendukung Implementasi e-government					Dokumen		0	0	0	3	3	3	9	
				Jumlah peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi e-government	IKK berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020				Regulasi		0	0	1	0	0	0	1	
				Jumlah dokumen perencanaan e-government					Dokumen		0	0	1	1	1	1	4	
				Jumlah dokumen perencanaan e-government					Dokumen		0	0	2	0	0	0	2	
		03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center					layanan		1	1	0	0	0	0	0	
				Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo					Bulan		0	0	3	12	2	12	29	
				Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center					layanan		0	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah pengelolaan suku cadang NOC					Unit		0	0	20	55	65	75	215	
				Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	IKK berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020				Persen		0	0	71	0	0	0	71	Target akhir Renstra yaitu 75 PD dari total 85 PD
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah					Perangkat Daerah		0	0	73	73	73	73	73	
				Jumlah pemeliharaan NOC					Bulan		0	12	12	0	0	0	24	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC)	inisiatif aksi untuk penyempurnaan SPBE Kabupaten Cirebon dengan langkah perumusan konsep DRC, feasibility studi DRC, pembangunan DRC dan pemeliharaan serta pengembangan DRC				DRC		0	0	0	1	1	1	1	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan					Unit		0	32	45	0	0	0	45	
		03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses					Sistem informasi		0	5	0	0	0	0	5	
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah					Aplikasi		0	0	1	5	5	5	16	
				Persentase data yang dapat berbagi pakai					Persen		0	0	26	0	0	0	26	Target Akhir Renstra 15 layanan publik dari total 34 layanan publik
				Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi					Aplikasi		0	0	2	0	0	0	2	
				Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat					orang		0	0	100	0	0	0	100	
		03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik					kegiatan		0	1	0	0	0	0	1	
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah					Sistem informasi		0	0	0	2	2	2	6	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Berdasarkan IKK Permendagri 18 Tahun 2020				sarana media		0	0	2	0	0	0	2	
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik					Kegiatan		0	0	1	2	2	2	7	
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik					Kegiatan		0	0	2	0	0	0	2	
				Jumlah monitoring dan evaluasi SPBE					Kegiatan		0	0	0	1	1	1	3	
		03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi					Aplikasi		0	2	0	0	0	0	2	
				Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik					Aplikasi		0	0	2	5	5	5	17	
				Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city					aplikasi		0	0	4	0	0	0	4	
		03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi	Terintegrasinya layanan publik dan pemerintahan				Layanan Publik		0	2	0	0	0	0	2	
				Tersedianya fasilitas operasional Cirebon Katon Respon 112					Kegiatan		0	0	1	1	1	1	4	
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah					Persen		0	0	26	0	0	0	26	Target akhir Renstra adalah 15 layanan publik dari total 34 layanan publik
				Jumlah titik pembangunan CCTV, videotron, video conference dan kelengkapannya					Lokasi		0	0	10	10	10	10	40	
				Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon					Aplikasi		0	0	3	0	0	0	3	
				Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah lain					tahun		0	0	1	0	0	0	1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City					kegiatan		1	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	Rencana aksi dalam rangka diseminasi Kabupaten Cirebon Smart City				Orang		0	0	70	70	80	90	310	
				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020				Persen		0	62	71	0	0	0	71	Target akhir Renstra adalah 75 PD dari 85 PD
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city					Perangkat Daerah		0	0	3	3	6	9	9	
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city					Orang		0	0	60	0	0	0	60	
		03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur SDM TIK pemerintah daerah tersertifikasi	Tersertifikasinya aparatur SDM TIK				orang		0	20	0	0	0	0	20	
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi					Orang		0	0	0	140	150	160	450	
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek					orang		0	110	100	0	0	0	210	
				Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi					Orang		0	0	210	250	250	250	960	
				Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020				Orang		0	0	80	0	0	0	80	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020				Orang		0	0	130	0	0	0	130		
		03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi kompetensi GCIO					orang		0	7	0	0	0	0	7		
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat kompetensi GCIO					Orang		0	0	0	15	15	15	45		
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi GCIO					Orang		0	0	10	0	0	0	10		
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif	$= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$	Non Kumulatif	Meningkat	POIN	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (2020-2021) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (2022-2024)	55,52	56,63	40	45	50	57	57	SAQ = Self Assessment Questioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak	
	02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Penerapan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui layanan informasi dan komunikasi yang digunakan	$= \frac{\sum \text{realisasi layanan informasi dan komunikasi publik}}{\sum \text{layanan informasi dan komunikasi publik}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	52,5	52,5	0	0	0	0	0	Layanan berupa diseminasi informasi melalui kemitraan komunikasi, penggunaan media komunikasi publik dalam diseminasi informasi, dan fasilitasi sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Kab Cirebon	
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Penerapan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui layanan informasi dan komunikasi publik, diseminasi informasi melalui kemitraan komunikasi, pemanfaatan media komunikasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik	$= \text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah} / \text{Jumlah penduduk} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Bidang PKIP (2020-2021) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (2022-2024)	0	60	65	70	75	80	80	Berdasarkan IKK Permendagri 18 Tahun 2020	

1	2	3	4	5	6	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
		02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik	Koordinasi dan konsultasi terkait urusan informasi dan komunikasi publik				tahun		0	1	1	0	0	0	2	
				Jumlah kebijakan teknis daerah (Perbup dan/ Keputusan Bupati dan/ Keputusan Kadis) bidang informasi dan komunikasi publik yang diterbitkan	Penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik setiap tahunnya				Kebijakan		0	0	0	1	1	1	3	
				Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah bidang informasi dan komunikasi publik					Regulasi		0	0	1	0	0	0	1	
				Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis	Partisipasi kegiatan tingkat nasional bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik				Rekomendasi		0	0	1	1	1	1	4	
				Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional					Kegiatan		0	0	1	0	0	0	1	
		02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik					paket		0	1	1	0	0	0	2	
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak					Layanan		0	0	0	26	26	26	78	
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak					Buah		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media online					Layanan		0	0	0	12	12	12	36	
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media online					Buah		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat					Layanan		0	0	0	12	12	12	36	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah buian layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat					Buah		0	0	12	0	0	0	12	
		02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	Masyarakat mengetahui berita/informasi program kegiatan pemerintah daerah				konten		200	365	0	0	0	0	365	
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan					Konten		0	0	90	365	365	365	1.185	
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	Masyarakat mengetahui berita/informasi program kegiatan pemerintah daerah				Konten		0	0	365	0	0	0	365	
		02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola	Tersebar nya informasi pembangunan daerah kepada aparaturnya				media		1	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	Penerbitan majalah paseban yang dikelola Diskominfo				Eksemplar		0	0	1.200	3.430	3.430	3.430	11.490	
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	Penerbitan Majalah Paseban				Eksemplar		0	0	3.000	0	0	0	3.000	
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	Penerbitan informasi yang dicetak melalui (booklet, leaflet, baliho, spanduk, reklame, dll)				Lembar		0	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000	
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, spanduk, baliho, reklame, dll				Lembar		0	0	2.000	0	0	0	2.000	
		02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi publik pemerintah daerah				layanan		2	4	0	0	0	0	0	
				Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas dan mempunyai sertifikat untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kegiatannya berupa sosialisasi, pembinaan, saresehan dan workshop yang diikuti PPID				orang PPID		0	0	85	85	90	100	360	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					Badan Publik		0	0	76	0	0	0	76	
				Jumlah penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui pemutaran film				Kali		0	0	0	12	12	12	36	
				Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui pemutaran film					Kali		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui mobil wawar keliling				Kali		0	0	10	36	36	36	118	
				Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui wawar keliling					Kali		0	0	36	0	0	0	36	
				Jumlah terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui TV lokal				Publikasi		0	0	3	13	14	15	45	
				Terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV					publikasi		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui media online				Publikasi		0	0	30	100	100	100	330	
				Terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain					Publikasi		0	0	100	0	0	0	100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan					layanan		0	0	0	12	12	12	36	
		02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	Terdistribusikannya informasi pemerintah secara efektif				media		2	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui surat kabar				Terbit		0	0	20	180	180	180	560	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	Publikasi informasi melalui surat kabar				Terbit		0	0	130	0	0	0	130	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui saluran radio				Tayang		0	0	5	12	12	12	41	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	Publikasi informasi melalui program talkshow radio				Tayang		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	Kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah daerah melalui TV Lokal				Tayang		0	0	0	12	12	12	36	
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	Publikasi informasi melalui televisi lokal / regional				Tayang		0	0	12	0	0	0	12	
		02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan kapasitas SDM/pelajar melalui bimtek jurnalistik dan multimedia serta Diskominfo Awards				paket		0	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/bimtek bidang komunikasi dan informasi	Kegiatan berupa pelatihan/bimtek kejournalistikan, multimedia, dan atau pelatihan yang mendukung bidang komunikasi dan informasi				Orang		0	0	0	150	150	150	450	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
												13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Meliputi birtek jurnalistik dan mutimedia, diskoinfo Awards, Uji Kompetensi Wartawan				Kegiatan		0	0	3	0	0	0	3	
				Jumlah peserta yang memiliki inovasi dalam websitenya dan mengikuti ajang Diskoinfo Awards	Kegiatan berupa peningkatan kapasitas pelajar dalam mendukung bidang komunikasi dan informasi				Orang		0	0	0	100	100	100	300	
				Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat	Kegiatan berupa peningkatan kapasitas wartawan dalam kejournalistikan				orang		0	0	200	200	200	200	800	
		02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Kabupaten Cirebon				tahun		1	1	0	0	0	0	1	
				Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya	Operasional berupa honorarium komisioner komisi informasi dan penunjang lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi komisi informasi Kabupaten Cirebon				Bulan		0	0	3	12	12	12	39	
				Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Melalui Komisi Informasi Kabupaten Cirebon				Persen		0	0	85	0	0	0	85	
				Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon					Komisioner		0	0	5	0	0	0	5	
		02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	Tersalurkannya informasi kepada masyarakat, komunitas/mitra dalam rangka diseminasi informasi pembangunan				media		2	2	2	0	0	0	4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	Kegiatan diseminasi informasi melalui pertunjukan rakyat tradisional oleh FK METRA (KIM) dan sosialisasi/ pembinaan bagi KIM				Kali		0	0	3	8	8	8	27	
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	Melalui Radio Komunitas, FK METRA, dan komunitas lainnya				Kali		0	0	6	0	0	0	6	
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah			Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Statistik Sektoral pada Pemerintahan Kabupaten Cirebon selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga dimanfaatkan	$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{total komponen}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Bidang Statistik dan Persandian	36,5	40	52,5	65	77,5	90	90	Keterisian data SIPD dan dokumen statistik sektoral
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	Penyusunan dokumen statistik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	$= \frac{\sum \text{dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan}}{\sum \text{total dokumen statistik daerah}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Bidang Statistik dan Persandian	20	20	0	0	0	0	0	- Dokumen statistik daerah berupa PDRB, Statistik Daerah, SUSEDA, IPM, dll
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	Tingkat keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	$= \frac{\sum \text{data statistik sektoral yang diinput}}{\sum \text{data statistik sektoral yang tersedia}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Bidang Statistik dan Persandian	60	60	0	0	0	0	0	Tingkat keterisian data SIPD
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		$= \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan statistik dalam perencanaan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Bidang Statistik dan Persandian (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government (2022-2024)	0	0	40	60	80	100	100	Berdasarkan IKK Permendagri No 18 Tahun 2020
		02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				Dok		1	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah buku statistik daerah/profil daerah					Dokumen		0	0	1	1	1	1	4	
				Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah	Berdasarkan IKK Permendagri 18 Tahun 2020				Dok		0	0	1	0	0	0	1	
		02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi statistik sektoral	Pelaksanaan forum data dan koordinasi berkaitan data statistik sektoral				tahun		0	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral					Jenis		0	0	1	1	1	1	1	
				Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun	Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020				Persen		0	0	25	0	0	0	25	
		02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Persentase ketersediaan data yang dikelola	Update informasi database pembangunan daerah				Prosen		60	60	0	0	0	0	0	
				Jumlah aplikasi satu data yang dibangun dan dikembangkan					Aplikasi		0	0	0	1	1	1	3	
				Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan					Aplikasi		0	0	1	0	0	0	1	
				Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah	Mengukur keterisian data SIPD dari total jumlah 2081 data (100%)				data		0	0	1.350	1.457	1.561	1.665	1.665	
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola					Persen		0	0	65	0	0	0	65	
		02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah IKM yang disusun	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				dokumen		0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Survei terkait PDRB Kec, SUSEDA, IKM, NTP, IPM				Survey		0	0	1	3	4	5	13	
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				dokumen		1	1	1	0	0	0	2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah dokumen IPM yang disusun	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				dokumen		1	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah dokumen SUSEDA yang disusun	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				dokumen		0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah dokumen NTP yang disusun	Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan				dokumen		0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun					Dokumen		0	0	1	0	0	0	1	IKK berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	LEVEL	Bidang Statistik dan Persandian	2	2	2	2	2	2	2	Evaluasi kelengkapan dan kematangan pengamanan informasi untuk 5 area: 1. Tata kelola keamanan informasi 2. Pengelolaan risiko keamanan informasi 3. Kerangka kerja keamanan informasi 4. Pengelolaan aset informasi 5. Teknologi dan keamanan informasi
	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan layanan persandian dengan menerapkan tanda tangan elektronik di SKPD Kabupaten Cirebon	$\frac{\sum \text{perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\sum \text{total perangkat daerah}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Bidang Statistik dan Persandian	0	6	0	0	0	0	0	Tanda tangan elektronik pada SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	Parameter terkait tingkat keamanan informasi pemerintah	=Jumlah Perangkat daerah yang telah melaksanakan tanda tangan elektronik / Jumlah Perangkat daerah x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Bidang Statistik dan Persandian (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government (2022-2024)	0	56,4	56,6	56,8	57	57,2	57,2	Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
	02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	Terpenuhinya sarana pendukung untuk penyelenggaraan persandian				paket		0	1	0	0	0	0	1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah dokumen kebijakan teknis persandian dalam pengamanan informasi					Dokumen		0	0	0	1	1	1	3	
				Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi					Paket		0	0	1	0	0	0	1	
				Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan					Paket		0	0	0	1	1	1	3	
		02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah koordinasi bidang persandian yang terfasilitasi	Koordinasi dan konsultasi terkait persandian				tahun		0	1	0	0	0	0	1	
				Jumlah aplikasi yang diamankan					Aplikasi		0	0	0	10	10	10	30	
				Jumlah sosialisasi/bimtek melalui sertifikat elektronik	Terpenuhinya layanan yang cepat, sederhana dan efisien				kegiatan		0	2	0	0	0	0	2	
				Jumlah manajemen akses dan identitas yang dikelola					Dokumen		0	0	0	2	2	2	6	
				Jumlah peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi					Regulasi		0	0	1	0	0	0	1	
				Jumlah anti malware yang disediakan					Paket		0	0	0	1	1	1	3	
		02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan keamanan informasi	Terselenggaranya layanan persandian				layanan		0	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik					Kegiatan		0	0	1	13	13	13	40	
				Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik					kegiatan		0	0	2	0	0	0	2	
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi					Kali		0	0	80	120	120	120	440	
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi					Kali		40	0	120	0	0	0	120	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota															
		02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring sandi	Tercapainya kerahasiaan informasi pemerintah daerah				kegiatan		0	2	0	0	0	0	2	
				Terpeenuhnya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya					Bulan		0	0	3	12	12	12	39	
				Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel					Bulan		0	0	12	0	0	0	12	
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi					Kegiatan		0	0	2	2	2	2	8	
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi					Kegiatan		0	0	2	0	0	0	2	
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan jaringan fiber optik Ophc Olt (jaringan komunikasi Perangkat Daerah berstandar keamanan persandian)					Perangkat Daerah		0	0	0	10	10	13	33	
	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi			Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	Terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017	$= \frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang diadakan}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100\%$	Kumulatif	Menurun	PERSEN	Bidang Statistik dan Persandian (2020)	10	10	0	0	0	0	10	Pada Tahun 2021-2024, indikator sasaran ini tidak digunakan lagi berdasarkan hasil dari pemetaan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon			Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	POIN	Sekretariat	3,25	3,55	3,57	3,59	3,61	3,63	3,63	Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	$= \frac{\sum \text{pelayanan yang disediakan}}{\sum \text{pelayanan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Sekretariat	75	80	85	90	95	100	100	

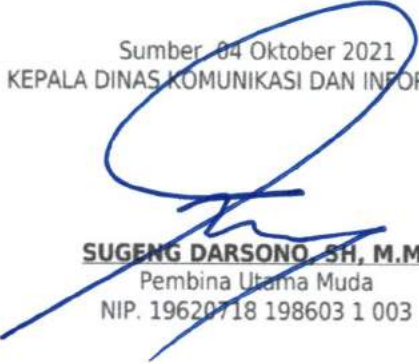
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja	$= \frac{\sum \text{sarana dan prasarana yang disediakan}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Sekretariat	75	80	85	90	95	100	100	Sarana dan prasarana penunjang kinerja
				Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Pemenuhan kebutuhan berpakaian sesuai aturan yang berlaku	$= \frac{\sum \text{aparatur yang disiplin}}{\sum \text{aparatur}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Sekretariat	75	0	100	100	100	100	100	Pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	$= \frac{\sum \text{dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan}}{\sum \text{dokumen capaian kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Sekretariat	100	100	100	100	100	100	100	LKIP, LKPJ, LPPD, IKU, PERKIN, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Bulanan Keuangan, Laporan Semesteran Keuangan, Laporan Tahunan Keuangan dan dokumen lainnya
				Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	$= \frac{\sum \text{dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan}}{\sum \text{dokumen perencanaan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	PERSEN	Sekretariat	100	100	100	100	100	100	100	RKA, DPA, KAK, RENJA, RENSTRA
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan serta Renstra Perangkat Daerah				dokumen		2	2	2	2	2	3	11	
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	LKIP, LPPD, LKPJ, IKU PERKIN (2 dok), Laporan triwulanan (4 dok), Rencana Aksi (2 dok), IKM, Dok SOP dan Proses Bisnis (2022)				dokumen		9	10	12	13	12	12	59	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	23	23	23	23	23	23	
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan dokumen laporan akhir tahun Perangkat Daerah				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Realisasi fisik dan keuangan bulanan dan semesteran				dokumen		13	13	13	13	13	13	65	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya	Peningkatan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas				stel		59	60	60	60	60	60	60	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik / penerangan yang difungsikan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran				jenis		1	1	0	0	0	0	0	
				Jumlah lampu yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik / penerangan yang difungsikan				buah		0	0	100	100	100	100	400	Pengadaan lampu
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang difungsikan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran				jenis		24	4	24	24	24	24	100	
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga				jenis		2	3	1	5	5	5	5	
				Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar untuk genset				liter		0	0	331.2	331.2	331.2	331.2	1.324.8	
				Tersedianya isi ulang tabung gas	Terpenuhinya kebutuhan tabung gas				Tabung		0	0	12	12	12	12	48	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai					dus		0	0	800	800	800	800	3.200	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difungsikan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran				jenis		15	12	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difungsikan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran				paket		0	0	12	12	12	12	48	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan wawasan pegawai				jenis		3	3	0	0	0	0	0	
				Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional	Meningkatkan wawasan pegawai				Eksemplar		0	0	5.280	5.280	5.280	5.280	21.120	
				Jumlah penyediaan jasa publikasi melalui surat kabar					publikasi		0	0	0	5	5	5	15	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Terpenuhiya kebutuhan ATK yang difungsikan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran				jenis		38	32	0	0	0	0	0	
				Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan					paket		0	0	12	12	12	12	48	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	Terpenuhiya jamuan tamu				dus		766	1.300	800	800	800	800	4.500	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah					Laporan		0	140	160	180	200	220	900	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Untuk mobilisasi kegiatan				Unit		1	1	2	3	0	1	7	
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah				jenis		5	7	8	8	8	8	39	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun				jenis		4	3	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun					Tagihan		0	0	36	36	36	36	144	
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya					orang		12	4	4	4	4	4	4	
				Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan					orang		3	3	3	3	3	3	3	
				Jumlah luasan kantor yang dibersihkan					M2		1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara					Gedung		0	3	0	0	0	0	3	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar	Pemenuhan BBM dan service untuk kendaraan dinas pegawai				Unit		100	15	15	16	16	16	16	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					Unit		0	0	0	16	16	16	48	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional				Unit		21	22	22	23	23	24	114	
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki					Jenis		4	5	0	0	0	0	5	
				Jumlah pemeliharaan AC	Terpeliharanya AC				kali		0	0	15	20	25	25	85	
				Jumlah pemeliharaan komputer	Komputer berfungsi dengan baik				kali		0	0	15	15	15	15	60	
				Jumlah pemeliharaan printer	Printer berfungsi dengan baik				kali		0	0	10	10	10	10	40	
				Jumlah pemeliharaan kamera	Kamera berfungsi dengan baik				kali		0	0	2	2	2	2	8	
				Jumlah pemeliharaan scanner	scanner berfungsi dengan baik				kali		0	0	2	2	2	2	8	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Terciptanya gedung kantor yang representatif				Paket		1	1	1	1	1	0	4	

Sumber: 04 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

REKAP PENDANAAN



REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.	NON BIDANG URUSAN	7.468.062.800	9.890.217.000	11.097.236.800	11.880.836.800	16.103.232.000	10.899.332.000	14.646.910.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.721.314.700	7.197.785.000	8.164.154.800	8.330.204.800	13.329.000.000	8.202.800.000	0
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.790.000	120.000.000	120.000.000	245.000.000	125.000.000	155.000.000	
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	75.000.000	
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.790.000	75.000.000	75.000.000	200.000.000	80.000.000	80.000.000	
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.197.000	4.607.085.000	4.784.000.000	4.975.000.000	5.179.000.000	5.393.000.000	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	4.561.085.000	4.738.000.000	4.928.000.000	5.131.000.000	5.345.000.000	
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.780.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000	14.000.000	
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.417.000	33.000.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.780.000	53.000.000	53.000.000	58.000.000	58.000.000	63.000.000	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.780.000	53.000.000	53.000.000	58.000.000	58.000.000	63.000.000	
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.744.700	721.700.000	763.700.000	810.900.000	843.000.000	876.000.000	
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.925.900	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.099.600	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.608.200	19.700.000	19.700.000	19.900.000	20.000.000	20.000.000	
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.816.000	25.000.000	36.000.000	56.000.000	60.000.000	65.000.000	
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	53.230.000	54.000.000	57.000.000	59.000.000	62.000.000	65.000.000	
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.160.000	13.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.705.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	375.000.000	
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345.700.000	536.000.000	690.000.000	970.000.000	975.000.000	545.000.000	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	350.000.000	500.000.000	775.000.000	775.000.000	320.000.000	
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	95.700.000	186.000.000	190.000.000	195.000.000	200.000.000	225.000.000	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.226.900.000	815.000.000	857.804.800	877.804.800	950.000.000	970.000.000	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.154.900.000	375.000.000	380.000.000	400.000.000	420.000.000	440.000.000	
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	440.000.000	477.804.800	477.804.800	530.000.000	530.000.000	
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.203.000	345.000.000	895.650.000	393.500.000	5.199.000.000	200.800.000	

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.388.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.515.000	13.000.000	13.650.000	14.500.000	15.000.000	15.800.000	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	32.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	35.000.000	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.300.000	200.000.000	750.000.000	195.000.000	5.000.000.000	0	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.462.400	21.260.000.000	34.249.000.000	32.545.800.000	32.835.800.000	33.175.800.000	0
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0	3.030.000.000	6.728.000.000	4.415.000.000	4.625.000.000	4.935.000.000	0
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	3.030.000.000	6.728.000.000	4.415.000.000	4.625.000.000	4.935.000.000	
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	25.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	70.000.000	80.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0	165.000.000	165.000.000	165.000.000	
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	150.000.000	155.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	0	50.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	0	100.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	0	0	525.000.000	800.000.000	810.000.000	820.000.000	
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	0	600.000.000	650.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	0	0	620.000.000	1.630.000.000	1.830.000.000	2.130.000.000	
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	0	460.000.000	1.130.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	230.000.000	400.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0	250.000.000	410.000.000	410.000.000	410.000.000	
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	610.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	350.000.000	375.000.000	0	0	0	
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	400.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	470.000.000	658.000.000	0	0	0	
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100.462.400	18.230.000.000	27.521.000.000	28.130.800.000	28.210.800.000	28.240.800.000	0
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	3.555.000.000	5.170.000.000	12.580.800.000	12.580.800.000	12.580.800.000	
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	350.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	20.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	3.505.000.000	3.600.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	0	1.200.000.000	12.432.800.000	12.432.800.000	12.432.800.000	
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.462.400	14.675.000.000	22.351.000.000	15.550.000.000	15.630.000.000	15.660.000.000	

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	50.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	350.000.000	200.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	12.315.000.000	16.300.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0	300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000	
2.16.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	150.000.000	200.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	0	10.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	200.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	700.000.000	821.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	2.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	100.000.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000	
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100.462.400	160.000.000	160.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	40.000.000	480.000.000	500.000.000	520.000.000	
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	450.000.000	600.000.000	0	0	0	
2.16.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
2.16.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0	100.000.000	120.000.000	0	0	0	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.413.488.900	740.617.000	2.730.000.000	1.540.000.000	2.560.000.000	3.100.000.000	0
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.413.488.900	740.617.000	2.730.000.000	1.540.000.000	2.560.000.000	3.100.000.000	0
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.413.488.900	740.617.000	2.730.000.000	1.540.000.000	2.560.000.000	3.100.000.000	
2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	0	0	80.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	
2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	90.248.000	99.617.000	100.000.000	0	0	0	
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	40.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	60.000.000	150.000.000	0	0	0	
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	200.000.000	213.000.000	400.000.000	0	0	0	
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	0	0	90.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
2.20.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	0	320.000.000	780.000.000	1.800.000.000	2.340.000.000	
2.20.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1.123.240.900	368.000.000	1.550.000.000	0	0	0	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	1.170.000.000	1.365.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	0

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	1.170.000.000	1.365.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	0
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1.070.000.000	1.050.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	600.000.000	200.000.000	0	0	0	
2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	120.000.000	150.000.000	0	0	0	
2.21.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
2.21.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	350.000.000	600.000.000	0	0	0	
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100.000.000	315.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	
2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	215.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
JUMLAH		5.235.266.000	30.368.402.000	46.508.154.800	44.466.004.800	50.774.800.000	46.528.600.000	0

Sumber, 04 Oktober 2021
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUGENG DARSONO, SH, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620718 198603 1 003

**RENCANA BULAN CAPAIAN
INDIAKTOR KINERJA**



RENCANA BULAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)												
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi			Indeks Domain Tata Kelola SPBE												
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi												
				Cakupan pengelolaan aplikasi informatika												
		03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo												
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya												
		03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain												
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya												
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik												
				Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain												
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara												
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik												
		03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet, jumlah downline akses dan jumlah penerima akses												
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas												
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas												
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo												
				Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo												
				Jumlah pemeliharaan Fiber Optik yang difasilitasi Dinas Kominfo												
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik)												
				Jumlah pemeliharaan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo												
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan												
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN)												
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah titik hotspot area publik yang dibangun												
				Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah												
				Pengendalian Bandwidth dan monitoring jaringan TIK (Belanja sewa fiber optik)												
		03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi												
		03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang terbit dalam mendukung Implementasi e-government												
				Jumlah regulasi dan kebijakan mengenai domain dan indeks SPBE												
				Jumlah peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi e-government												
				Jumlah dokumen perencanaan e-government												
				Jumlah dokumen perencanaan e-government												
		03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo												
				Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center												
				Jumlah pengelolaan suku cadang NOC												
				Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center												
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah												
				Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah												
				Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC)												
				Jumlah pemeliharaan NOC												
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan												
		03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah												
				Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses												
				Persentase data yang dapat berbagi pakai												
				Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi												
				Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat												
		03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik												
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah												
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah												
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik												
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah monitoring dan evaluasi SPBE												
		03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik												
				Jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi												
				Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city												
		03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya fasilitasi operasional Cirebon Katon Respon 112												
				Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi												
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah												
				Jumlah titik pembangunan CCTV, videotron, video conference dan kelengkapannya												
				Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon												
				Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah lain												
		03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city												
				Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City												
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city												
				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city												
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city												
		03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur SDM TIK pemerintah daerah tersertifikasi												
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi												
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek												
				Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi												
				Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi												
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi												
		03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi kompetensi GCIO												
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat kompetensi GCIO												
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi GCIO												
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik												
		02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah												
		02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan												
		02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan teknis daerah (Perbup dan/ Keputusan Bupati dan/ Keputusan Kadis) bidang informasi dan komunikasi publik yang diterbitkan												
				Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik												
				Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah bidang informasi dan komunikasi publik												
				Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis												
				Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional												
		02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak												
				Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik												
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media online												
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak												
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media online												
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat												
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat												
		02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan												
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan												
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan												
		02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola												
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan												
				Jumlah media luar ruang yang dicetak												
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan												
				Jumlah media luar ruang yang dicetak												
		02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat												
				Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas dan mempunyai sertifikat untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya												
				Jumlah penyebaran informasi melalui pemutaran film												
				Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik												
				Jumlah penyebaran informasi melalui wawar keliling												
				Terlaksananya penyebaran informasi melalui pemutaran film												
				Terlaksananya penyebaran informasi melalui wawar keliling												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV												
				Terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV												
				Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain												
				Terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain												
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan												
		02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV												
		02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/bimtek bidang komunikasi dan informasi												
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi												
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi												
				Jumlah peserta yang memiliki inovasi dalam websitenya dan mengikuti ajang Diskominfo Awards												
				Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat												
		02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya												
				Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon												
				Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi												
				Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon												
		02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon												
				Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal												
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon												
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral												
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan												
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon												
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah												
		02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah												


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah												
				Jumlah buku statistik daerah/profil daerah												
				Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah												
		02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi statistik sektoral												
				Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral												
				Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun												
		02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Persentase ketersediaan data yang dikelola												
				Jumlah aplikasi satu data yang dibangun dan dikembangkan												
				Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan												
				Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah												
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola												
		02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS												
				Jumlah IKM yang disusun												
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun												
				Jumlah dokumen IPM yang disusun												
				Jumlah dokumen SUSEDA yang disusun												
				Jumlah dokumen NTP yang disusun												
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun												
			Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)												
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah												
				Tingkat keamanan informasi pemerintah												
		02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian												
		02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan teknis persandian dalam pengamanan informasi												
				Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi												
				Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi												
				Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan												
		02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang diamankan												
				Jumlah koordinasi bidang persandian yang terfasilitasi												
				Jumlah sosialisasi/bimtek melalui sertifikat elektronik												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah manajemen akses dan identitas yang dikelola												
				Jumlah peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi												
				Jumlah anti malware yang disediakan												
		02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik												
				Jumlah pelayanan keamanan informasi												
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi												
				Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik												
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi												
		02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)												
		02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring sandi												
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya												
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi												
				Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel												
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan jaringan fiber optik Ophc Olt (Jaringan komunikasi Perangkat Daerah berstandar keamanan persandian)												
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi												
			Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi												
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat												
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran												
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik												
				Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas												
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan												
				Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan												
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun												
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun												
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja												
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun												
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun												
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran												
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan												
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya												
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan												
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan												
				Jumlah lampu yang disediakan												
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan												
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan												
				Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya												
				Tersedianya isi ulang tabung gas												
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai												
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan												
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan												
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												
				Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional												
				Jumlah penyediaan jasa publikasi melalui surat kabar												
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan												
				Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan												
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu												
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah												
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan												
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan												
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan												
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan												
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun												
				Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BULAN											
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya												
				Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan												
				Jumlah luasan kantor yang dibersihkan												
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara												
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara												
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar												
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara												
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya												
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki												
				Jumlah pemeliharaan AC												
				Jumlah pemeliharaan komputer												
				Jumlah pemeliharaan printer												
				Jumlah pemeliharaan kamera												
				Jumlah pemeliharaan scanner												
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki												

Sumber, 04 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003